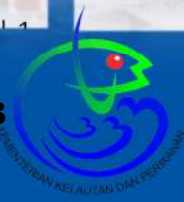




PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 - 2021



DINAS PERIKANAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Jl. Letkol Pol. Toegino-Kuala Tungkal, Tlp/Fax. 0742 21023
Email : diskan.tanjabbarkab@gmail.com



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan RENSTRA dimaksudkan untuk menetapkan standar ukuran keberhasilan pembangunan selama lima tahun yaitu tahun 2017–2021 di bidang Kelautan dan Perikanan sekaligus sebagai dasar evaluasi keberhasilan program dan kegiatan dalam tiap tahunnya.

Rencana Strategi Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memuat Visi, Misi dan program kerja pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Dalam penyusunan ini telah memperhatikan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra) Pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan dari semua bidang, kerjasama yang kuat antar pemerintah dengan semua pihak, komitmen dan dukungan DPRD serta kerjasama dengan perguruan tinggi dan masyarakat sipil. Insya Allah Pelaksanaan Renstra Pembangunan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan amanat kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan.

Semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, khususnya bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2. Sumberdaya SKPD.....	14
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.....	22
2.4. Tantangan dan Peluang SKPD.....	27
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD	33
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan SKPD.....	33
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	36
3.3. Telaah Renstra K/L, Renstra SKPD Provinsi, Renstra Kabupaten	50
3.4. Telaah RTRW Tanjung Jabung Barat dan KLHS Tanjab Barat.....	63
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis berdasarkan TUPOSI Dinas Perikanan.....	67

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	79
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan Kab. Tanjab Barat.....	79
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	82
5.1. Strategi.....	82
5.2. Kebijakan.....	82
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	84
6.1. Program dan Kegiatan.....	84
6.2. Target Kinerja.....	86
6.3. Kerangka Pendanaan.....	88
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	89
BAB VIII. PENUTUP	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Alur Kedudukan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.	3
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kab. Tanjung Jabung Barat	13

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Review pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 - 2016	23
Tabel 2.2. Review Anggaran dan realisasi Pendanaan Diskan Tahun 2011-2016	25
Tabel 2.3. Komparasi Capaian Sasaran Renstra Diskan Kab. Tanjung Jabung Barat Terhadap Sasaran DKP Provinsi Jambi dan KKP Republik Indonesia	28
Tabel 2.4. Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah Kab. Tanjung Jabung Barat.....	30
Tabel 2.5. Hasil Telaah Pola Ruang Wilayah Provinsi Jambi	32
Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Diskan	34
Table 3.2. Keterkaitan Misi, Tujuan dan sasaran Pembangunan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021	42
Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap Capaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	48
Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten Berdasarkan Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan.....	58
Tabel 3.5. Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten Berdasarkan Renstra SKPD Provinsi Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan	61
Tabel 3.6. Permasalahan Pelayanan DPK berdasarkan RTRW beserta Faktor Penghambat dan Pendorong.....	66
Tabel 3.7. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Diskan	70
Tabel 3.8. Identifikasi Isu-Isu Strategis.....	72
Tabel 3.9. Analisis Strategi dengan Faktor SWOT	75
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	81
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	83
Tabel 6.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis	86

Tabel 6.2. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021	88
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama Diskan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	89

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan salah satu 9 (Sembilan) Program Prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, atau yang sering disebut dengan *Nawacita*, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dimana sektor kelautan dan perikanan merupakan bagian integral dari pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan secara prinsipil direncanakan serta disusun sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional, dilakukan secara bersama oleh seluruh pemangku kepentingan, diintegrasikan dengan tata ruang wilayah dengan memperhatikan potensi dan prioritas daerah serta dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan bidang kelautan dan perikanan diperlukan langkah-langkah terobosan yang bukan merupakan upaya terpisah dari kebijakan lain atau kebijakan sebelumnya, tetapi merupakan upaya integrasi yang saling memperkuat dalam rangka percepatan pembangunan kelautan dan perikanan, terutama untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan.

Bertitik tolak dari dasar pemikiran tersebut, maka Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021 disusun untuk dipergunakan sebagai *Pedoman dalam Merencanakan dan Merumuskan* pelaksanaan program kerja pembangunan kelautan dan perikanan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Hal tersebut didukung oleh kinerja aparatur

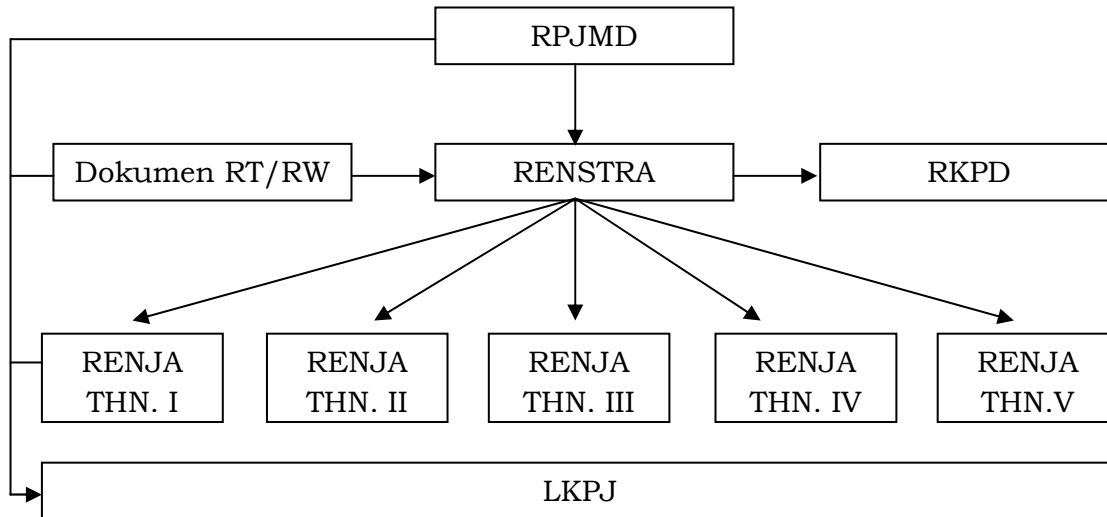
dan kelembagaan dalam menghadapi tuntutan masyarakat atas peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

Rencana Strategis (Renstra) merupakan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang responsive dalam jangka panjang terhadap kondisi yang dihadapi daerah, berorientasi kedepan dan berupaya membangun masyarakat berbasis perspektif kebutuhan daerah, dengan memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang ada. Rencana strategis instansi pemerintah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta bersifat indikatif.

Renstra satuan kerja merupakan Dokumen Perencanaan yang menjabarkan isu-isu permasalahan strategis pembangunan daerah yang menjadi kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta program-program strategis yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana, bertahap dan mempunyai tolak ukur serta target pencapaian kinerja yang jelas melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan turunan/penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan merupakan Pedoman Perencanaan bagi Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan maupun rencana unit pelaksana teknis yang ada dibawah Dinas Perikanan.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal dalam implementasinya maka proses penyusunan Renstra OPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua *stakeholder* melalui proses yang transparan, demokratis, terpadu dan akuntabel. Tanpa perencanaan strategis yang baik maka instansi pemerintah kemungkinan besar tidak akan dapat mencapai tujuannya. Bagan alur kedudukan Renstra dapat dilihat pada Gambar 1.1. berikut ini :

Gambar 1.1.
Bagan Alur Kedudukan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renstra

Renstra merupakan Dokumen Perencanaan Taktis Strategis untuk menjabarkan potret permasalahan pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat seperti yang telah dituangkan dalam indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan tersebut secara bertahap melalui sumber pembiayaan APBD dan APBN. Oleh karenanya, landasan penyusunan Renstra Pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Bungo, Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755).
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 286);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Nomor 4816);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013–2033;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6);
35. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021 ini adalah sebagai acuan resmi bagi Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, swasta, dan masyarakat umum dalam pembangunan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program/kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang.

Adapun Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021 yang bermutu dan akuntabel adalah :

1. Menjabarkan secara umum kondisi urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sekaligus menjelaskan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu tertentu dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021;
2. Memberi arah kebijakan perencanaan serta prioritas pembangunan urusan kelautan dan perikanan tahun 2016 - 2021;

3. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021 dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
4. Sebagai pedoman dalam pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban, dan evaluasi kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII. PENUTUP

BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

2.1. Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai Tugas Pokok “melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang kelautan dan perikanan”. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi, yaitu :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tugas pokok dan fungsi masing-masing sekretariat dan Bidang di Lingkungan Unit Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung jabung Barat adalah sebagai berikut :

- 1) **Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
- 2) Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan asset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, kersipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- 3) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 4) Pengelolaan barang milik / kekayaan negara; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;

2) Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan tangkap.

Dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidaang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang perikanan tangkap;
- 2) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, bimbingan teknis kenelayanan pemantauan dan evaluasi sarana prasarana pemberdayaan nelayan kecil, kemitraan usaha nelayan, dan kelembagaan nelayan;

- 3) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perijinan, rekomendasi, pemungutan pajak dan retribusi, serta pengawasan dan pembinaan usaha perikanan tangkap;
- 4) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), sarana prasarana penangkapan ikan, pengawasan mutu hasil perikanan; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;

3) Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberdayaan, pengelolaan, pengembangan benih, sarana dan prasarana, pencegahan, pengendalian hama di bidang perikanan budidaya.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas, Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang perikanan budidaya;
- 2) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, bimbingan teknis budidaya ikan, pemantauan dan evaluasi cara pembesaran dan pembenihan ikan, serta pengembangan sarana dan prasarana budidaya ikan ;
- 3) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, bimbingan teknis budidaya ikan, pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha, pembinaan kelembagaan usaha pembudidayaan, pengembangan sarana dan prasarana usaha budidaya, dan promosi hasil perikanan budidaya;
- 4) Penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan budidaya perikanan, bimbingan teknis mutu pakan ikan,

pengecegan hama penyakit ikan, pengawasan obat ikan, pengecegan hama penyakit ikan, pengawasan obat ikan, penyediaan data dan informasi pengelolaan air, lahan, kesehatan ikan, lingkungan dan pengembangan demplot percontohan budidaya ikan; dan

- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1. Struktur Organisasi

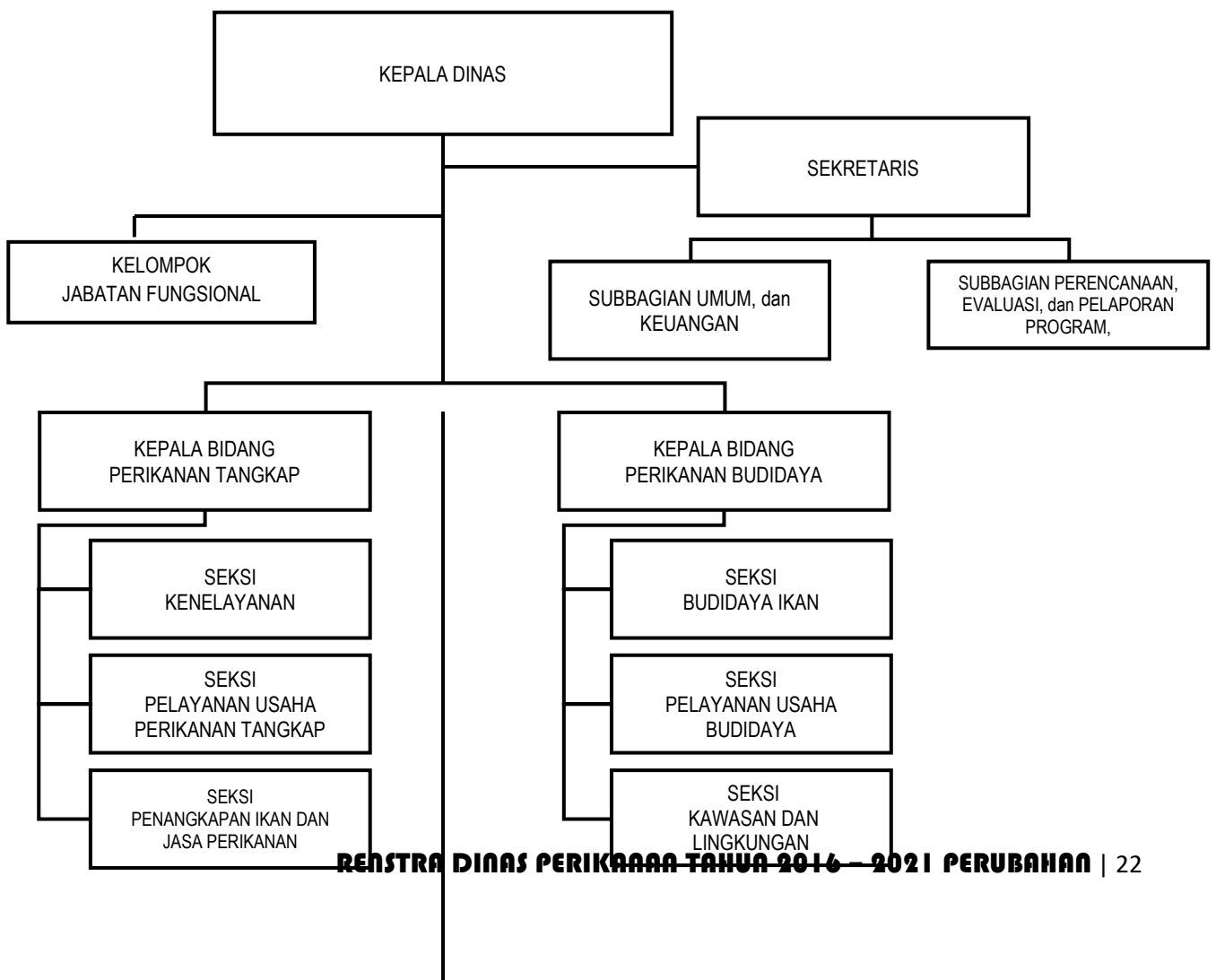
Bagian Tata Pemerintahan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unit Perangkat Daerah Dinas Perikanan yang ditetapkan dengan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan.

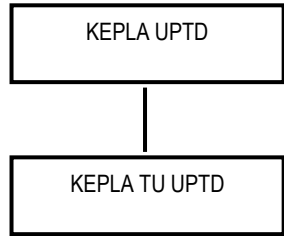
Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendapatkan tipologi C. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka susunan organisasi Bagian Tata Pemerintahan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. 1 (satu) orang Kepala Dinas;
2. 1 (satu) orang Sekretaris;
3. 2 (dua) orang Kepala Bidang;
4. 2 (dua) orang Sub Bagian;
5. 6 (enam) orang Seksi;
6. 1 (satu) Orang Kepala UPTD; dan
7. 1 (satu) Orang Kepala TU UPTD.

Setiap Bidang dibantu oleh staf/fungsional umum sebagai unsur teknis pelaksana. Selengkapnya mengenai Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada Gambar 2.1. sebagai berikut :

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Dinas Perikanan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat





2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kepegawaian

Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 78 orang dengan susunan kepegawaian yang dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan, eselon dan status kepegawaian sebagai berikut :

- 1) Menurut Golongan Kepangkatan, Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Golongan IV, sebanyak 8 Orang terdiri dari :
 - Golongan IV/c : 1 Orang
 - Golongan IV/b : 1 Orang
 - Golongan IV/a : 3 Orang
 - b. Golongan III, sebanyak 22 Orang terdiri dari :
 - Golongan III/d : 4 Orang
 - Golongan III/c : 9 Orang
 - Golongan III/b : 4 Orang
 - Golongan III/a : 4 Orang
 - c. Golongan II, sebanyak 2 Orang terdiri dari :
 - Golongan II/c : 1 Orang
 - Golongan II/b : 1 Orang
- 2) Menurut Tingkat Pendidikan, Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Pasca Sarjana (S2), sebanyak 1 Orang terdiri dari :
 - Magister Ekonomi – ME : 1 Orang
 - b. Sarjana (S1), sebanyak 19 Orang terdiri dari :
 - Sarjana Perikanan : 14 Orang
 - Sarjana Ekonomi : 3 Orang
 - Sarjana Hukum : 1 Orang

- Sarjana Teknik : 1 Orang
 - Sarjana Pertanian : 1 Orang
 - Sarjana Peternakan : 1 Orang
 - Sarjana Pemerintahan : 2 Orang
 - Sarjana Pendidikan : 2 Orang
 - Sarjana Komunikasi : 3 Orang
 - Sarjana Sosial : 1 Orang
- c. Sarjana Muda (Diploma) sebanyak 2 Orang
- d. Sekolah Tingkat Menengah Sederajat sebanyak 29 Orang
- 3) Menurut Eselon, Pegawai Dinas Perikanan kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :
- a. Eselon II, sebanyak 1 Orang
 - b. Eselon III, sebanyak 3 Orang
 - c. Eselon IV, sebanyak 10 Orang
 - d. Non Eselon, sebanyak 52 Orang
- 4) Menurut Status Kepegawaian, Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :
- a. PNS, sebanyak 27 Orang
 - b. TKS, sebanyak 1 Orang
 - c. TKK sebanyak 36 Orang
 - d. Tenaga Teknis Lapangan sebanyak 8 Orang

2.2.2. Aset/Modal

Dinas Perikanan kabupaten Tanjung Jabung Barat menempati tanah seluas 1.200 M² dengan luas bangunan 420 M² yang terdiri dari Gedung Utama Kantor, Ruang pertemuan dan Kantin. Sedangkan untuk menunjang kegiatan Administrasi Dinas Perikanan Kabupaten tanjung Jabung Barat didukung oleh fasilitas Komputer

desktop/laptop sebanyak 18 Unit, Air Conditioner sebanyak 7 Unit, dan Printer sebanyak 17 Unit.

Fasilitas Kendaraan Dinas/Operasional yang ada sebanyak 36 Unit dengan rincian sebagai berikut :

- Kendaraan Roda 4 (empat) sebanyak 3 Unit
- Kendaraan Roda 2 (dua) sebanyak 27 Unit
- Alat Berat (Eksapator) sebanyak 1 Unit

Selain itu Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai aset berupa Balai Benih Ikan (BBI) sebanyak 1 Unit, penataan yang menempati tanah seluas kurang lebih 2 Ha. Keberadaan BBI tersebut guna memenuhi kebutuhan benih ikan yang berkualitas, sebagai tempat pelatihan pembudidaya ikan dan pembinaan Unit Pembenihan Rakyat (UPR), Unit Percontohan Budidaya Air Payau (UPBAP) sebanyak 1 Unit yang menempati tanah seluas 5 Ha, keberadaan UPBAP ini guna menunjang percontohan dan olah teknologi pengembangan budidaya air payau, Pabrik Es sebanyak 2 Unit, Show Room sebanyak 1 Unit dan asset-aset lain penunjang pengembangan pembangunan kelautan dan perikanan.

2.2.3. Unit Usaha

Secara geografis wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari rawa, dataran rendah, pegunungan dan kawasan pantai, sebagian dari wilayah tersebut memiliki sumberdaya alam yang potensial untuk pengembangan usaha sektor kelautan dan perikanan. Wilayah yang potensial untuk usaha perikanan adalah wilayah perairan laut dengan kawasan pantai yang terbentang sepanjang \pm 45 Km mulai dari Kecamatan

Kuala Betara sampai Kecamatan Seberang Kota, dan beberapa wilayah Kecamatan di pedalamannya berpotensi untuk dikembangkan usaha perikanan air tawar.

Kegiatan utama usaha sektor Kelautan dan Perikanan adalah perikanan tangkap, perikanan budidaya (tawar dan payau) dan usaha pengolahan hasil perikanan. Ketiga usaha tersebut memberikan kontribusi dalam penyediaan dan keragaman bahan pangan dari protein hewani, dengan demikian pengembangan usaha penangkapan, budidaya dan pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius.

Potensi Kelautan dan Perikanan yang dimiliki oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Potensi Perikanan Tangkap

A. Perikanan Laut

Sumberdaya ikan merupakan salah satu sumber alam yang dapat diperbarui dengan persyaratan eksploitasi terhadap sumberdaya tersebut dikelola dengan baik, sehingga tidak terjadi overfishing. Wilayah pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Barat sepanjang \pm 45 Km merupakan sumber penggerak perekonomian bagi masyarakat yang bertempat tinggal di 3 (Kecamatan) wilayah pesisir, yaitu kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Tungkal Ilir dan Kecamatan Seberang Kota.

Pengembangan dan pelestarian potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dalam pembangunan yang berkelanjutan, memerlukan pengelolaan dan teknik penanganan yang tepat. Namun, sampai saat ini pengembangan dan pelestarian potensi yang ada tersebut belum dilakukan secara optimal, berhasil guna dan berdaya guna.

Perikanan Laut Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan secara umum laut Provinsi Jambi merupakan bagian dari Laut Cina Selatan, sehingga perhitungan potensi perikanan laut tidak terbatas pada potensi laut kewenangan Kabupaten sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 22 Tahun 1999, tetapi meliputi juga potensi pemanfaatan pada perairan lepas pantai Wilayah *Fishing Ground II* sebagaimana diatur dalam Kepmentan No.995/Kpts/IK.210/9/99 tanggal 27 September 1999, bahkan ZEE Laut Cina Selatan. Potensi Perikanan Laut dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Laut Kabupaten : 28.675 Ton/Tahun
- b. Laut provinsi : 77.980 Ton/Tahun
- c. Potensi pemanfaatan Laut Natuna dan ZEEI Laut Cina Selatan ± Satu Juta Ton/Tahun

Ada dua strategi pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap secara berkelanjutan dalam upaya memaksimalkan keuntungan nelayan jangka panjang dan mencegah penangkapan yang berlebihan serta terkurasnya sumberdaya ikan di perairan laut Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu: (1) Kebijakan pembangunan penangkapan (*ekspansi*) dengan menambah jumlah armada atau unit alat tangkap untuk memanfaatkan sumberdaya perikanan kategori kurang tangkap; (2) Kebijakan pengendalian perikanan tangkap dengan cara mengatur dan membatasi usaha penangkapan untuk kategori sumberdaya perikanan lebih tangkap (*over exploited*) Kebijakan pengendalian perikanan tangkap secara langsung membatasi kegiatan usaha nelayan dan harus disadari bahwa mereka menggantungkan hidupnya dari hasil utama kegiatan penangkapan ikan. Oleh karena itu upaya tersebut memerlukan pendekatan kehati-hatian (*precautionay approach*).

Sumberdaya Ikan di perairan laut Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah pada status *over exploited* atau bahkan sudah *ter-depleksi* (terancam tidak bisa dieksploitasi). Oleh karena itu, strategi kebijakan dalam rangka perbaikan pemanfaatan usaha penangkapan ikan yang akan diambil adalah pengendalian perikanan tangkap dengan cara membatasi usaha penangkapan atau menambah kapal penangkap ikan yang dapat menjangkau pada jalur 3 (Laut Nasional). Dalam rangka pemulihan stok cadangan ikan untuk perikanan tangkap berkelanjutan, maka tindak lanjut yang akan diambil dalam 5 (lima) tahun kedepan antara lain adalah :

- 1) Melakukan pembinaan terhadap masyarakat perikanan tentang pentingnya menjaga sumberdaya ikan agar lestari.
- 2) Melakukan pengaturan jumlah dan jenis alat tangkap yang boleh dioperasikan dengan mempertimbangkan kondisi stok cadangan ikan.
- 3) Melakukan Penambahan Armada Kapal penangkap ikan yang mempunyai kapasitas > 10 GT, agar supaya bisa menangkap ikan pada jalur 3 (Laut Nasional).
- 4) Bersama-sama dengan masyarakat, mengalokasikan area cadangan untuk percadangan kawasan konservasi, melakukan rehabilitasi mangrove, serta aplikasi teknologi pengkayaan sumberdaya ikan di laut.

B. Perairan Umum

Potensi lestari penangkapan ikan perairan umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperkirakan sebesar 1.000 ton/tahun yang tersebar di tiga sungai besar yaitu Sungai Pengabuan, Sungai Betara dan Sungai Pangkal Duri yang merupakan perbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta anak-anak sungai ketiga sungai tersebut dan rawa-rawa pada kawasan basah.

2. Potensi Perikanan Budidaya

A. Budidaya Ikan Air Payau

Potensi pengembangan tambak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat seluas 5.000 Ha dan tersebar di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Seberang Kota dan Kecamatan Kuala Betara. Kondisi lahannya maupun perairan pantainya cukup baik untuk pengembangan tambak. Pemanfaatan lahan budidaya tambak tahun 2013 seluas 307,2 Ha, akan tetapi pada tahun 2014 luas mengalami penurunan secara signifikan, hal ini dikarenakan banyak lahan tambak yang berubah fungsi menjadi kebun. Oleh karena itu melihat potensi budidaya ikan air payau yang cukup banyak ini dan mencegah terjadinya fungsi tambak menjadi kebun semakin meluas perlu ada upaya yang serius dari berbagai pihak dalam mengatasi permasalahan tersebut pada tahun mendatang.

B. Budidaya Ikan di Kolam

Potensi budidaya kolam di Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperkirakan 2.000 Ha yang tersebar di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Betara, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Tungkal Ulu dan Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Muara papalik dan Kecama Tebing Tinggi. Pada sub kawasan basah cocok untuk pengembangan budidaya ikan yang lebih toleran terhadap perubahan salinitas seperti ikan nila, patin dan ikan-ikan lokal lainnya. Potensi budidaya kolam tahun 2016 pemanfaatannya masih kecil yaitu untuk kolam 243,71 Ha.

Sejalan dengan semakin besarnya permintaan benih ikan, di beberapa tempat mulai terdapat UPR (Unit Pembenihan Rakyat) ikan. Unit pembenihan rakyat ini berfungsi sebagai penyedia kebutuhan benih bagi pembudidaya ikan. Namun demikian, benih yang dihasilkan tersebut belum optimal dalam memenuhi permintaan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya, sehingga para pembudidaya ikan masih banyak yang mencari benih keluar daerah.

Balai Benih Ikan (BBI) yang sekarang telah berkembang menjadi UPT Dinas Perikanan, mempunyai tugas untuk membina UPR dan memenuhi ketersediaan benih bagi masyarakat pembudidaya air tawar baik di dalam daerah maupun di luar daerah.

C. Budidaya Keramba

Potensi budidaya ikan dalam Keramba di Kabupaten Tanjung Jabung Barat seluas 1.000 Ha (10.000 unit) terutama di Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Merlung, Batang Asam, Pengabuan, Betara dan Bram Itam. Keramba Tahun 2011 - 2016 mengalami sedikit peningkatan yaitu dari 146 unit menjadi 272 unit, dari banyaknya potensi yang ada akan tetapi pemanfaatannya baru sekitar 2,72% hal ini menggambarkan masih sangat besarnya pengembangan Keramba Jaring Tancap di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Komoditas Ikan yang cocok dikembangkan dalam Keramba adalah Nila, Lele dan Patin (Kecamatan Pengabuan dan Betara) sedangkan untuk ikan yang tidak mempunyai kemampuan adaptasi tinggi cocoknya dikembangkan di Daerah Ulu, seperti Kecamatan Tungkal Ulu, Batang Asam, dan Kecamatan Merlung.

3. Potensi Pengolahan Hasil Perikanan

Potensi Pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih sangat potensial untuk dikembangkan, hal ini didukung dengan adanya Sentra Pengolahan Hasil Perikanan yang terus dikembangkan, dengan harapan produk hasil olahan perikanan semakin beragam dan inovatif, sehingga dapat meningkatkan penghasilan masyarakat, sekaligus meningkatkan PAD Kabupaten.

Potensi yang ada diperkirakan sekitar 18.000-20.000 ton/tahun yang bisa dimanfaatkan, karena dengan beragamnya hasil olahan perikanan bisa member nilai tambah, baik dari segi kualitas, kuantitas dan harga jual.

Unit usaha pengolahan ada sekarang adalah Unit Usaha Pengolahan kerupuk, Unit Usaha Pengolahan Terasi dan Unit Usaha Pengolahan ikan asin, dan pabrik es balok. Dari kelima unit usaha tersebut sampai saat ini sangat membantu masyarakat diharapkan kedepan usaha-usaha tersebut semakin maju dan bisa menarik investor sehingga tenaga kerja banyak terserap pada usaha pengolahan hasil perikanan.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

dan/atau Indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapaun table untuk gambaran kinerja pelayanan Dinas Perikanan dengan format sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 – 2016

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan	Satuan	Target Indikaotor Lainnya	Target Renstra DPK Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Penyusunan Dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) Pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dokumen	RENSTRA	1					1					100				
2	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dokumen	RENJA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
3.	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dokumen	LAKIP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
3	Mengkoordinasikan seluruh Kegiatan di Bidang kelautan dan perikanan Baik yang bersifat Administratif maupun Teknis	Dokumen	Koordinasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
4	Produksi																	
-	Perikanan Tangkap (Laut dan Umum)	Ton	Produksi	22.000	23.500	24.000	26.000	28.000	21.889	24.079	24.457	24.799	27.347	99,5	102	101	99,3	99,1
-	Perikanan Budidaya	Ton	Produksi	2.000	3.000	3.500	4.200	4.700	2.606	2.853	2.416	2.762	3.234	130	95	67	68	67
5	Konsumsi Ikan Masyarakat	Kg/Kpt/Thn	Kg	29	32,87	32	33	33,70	30	31,87	31,88	32,80	33	103	102	99,3	99,4	99,3
6	Peningkatan Kualitas Lingkungan Wilayah Pesisir dan Laut	%	%	6,70	8,10	8,90	9,70	10	7,40	8,50	9	10,10	12,10	110	105	101	112	130
7	Peningkatan Pendapatan																	
-	Nelayan	Rp. (000)		1.325	1.500	1.750	1.850	2.000	780	1.200	1.830	2.200	2.100	59	80	108	120	110

-	Pembudidaya	Rp.(000)	1.050	1.300	1.550	1.780	1.900	813	1.150	1.500	2.000	1.800	77	87	99,5	110	90
-	Pemasar	Rp.(000)	1.365	1.600	1.850	2.100	2.350	910	1.550	1.800	2.400	2.300	77	99,5	99,5	120	88
-	Pengolah Hasil Perikanan	Rp.(000)	1.185	1.350	1.650	1.830	1.920	983	1.450	1.700	2.100	2.200	72	115	114	130	132
8	Masyarakat yang mendapatkan Pelatihan/Pembinaan	Orang	500	750	900	1.250	1.500	500	835	1.450	1.500	900	100	111	161	120	60
9	Penyerapan Tenaga Kerja																
-	Perikanan Tangkap	Orang	2.300	2.700	3.200	3.550	3.800	2.600	3.034	3.800	3.876	4.064	120	136	126	107	165
-	Perikanan Budidaya	Orang	250	350	450	530	600	270	475	686	691	700	140	123	131	112	110
-	Pemasar	Orang	340	400	480	500	550	376	624	675	684	697	112	140	112	116	116
-	Pengolah Hasil Perikanan	Orang	75	100	120	200	330	90	145	180	200	365	145	145	150	100	106
10	Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN)	Kelompok	30	40	50	65	70	45	52	66	75	83	112	130	132	115	126
11	Jumlah Unit Pembenihan rakyat	Kelompok	2	3	4	5	7	2	3	4	4	4	100	100	100	90	90
12	Jumlah KUB Nelayan	Kelompok	45	55	65	75	85	45	55	65	75	85	100	100	100	100	100
13	Jumlah Pengolah	Orang	75	85	100	130	150	83	91	112	142	187	117	107	112	109	124
14	Jumlah Pemasar	Orang	120	130	140	180	220	127	149	187	223	296	106	115	133	127	134
15	Jumlah POKMASWAS	Kelompok	2	3	4	5	6	2	3	4	4	4	100	100	100	90	90
16	Luas Kawasan Konservasi, Restocking	Kawasan	5	5	5	6	6	5	5	5	5	5	100	100	100	90	90
17	Jumlah Kawasan Minapolitan	Kawasan	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Jumlah Armada Perikanan Tangkap	Unit	900	950	1000	1100	1100	967	962	962	969	1020	113	108	96	88	92
19	Jumlah TPI	Unit	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100	0	0	0	0

Dari Tabel 2.1. diatas terlihat hampir semua Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat tercapai. Adapun beberapa target kinerja yang tidak tercapai 100 % lebih dikarenakan kendala teknis dan alam, walau demikian tidak mengurangi

tujuan utama dalam Renstra ini, yaitu peningkatan kesejahteraan nelayan. Oleh karena itu perlu ditingkatkan kualitas dari output dan dokumen perencanaan sehingga lebih implementatif dalam pelaksanaannya.

Tabel 2.2.
Review Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perikanan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 – 2016

No	Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	330.213.650	1.116.175.150	272.340.300	232.154.000	691.418.500	286.505.450	1.106.352.350	265.650.000	213.289.000	657.197.000	66,87	99	97,53	91,87	95,05	147,58	149,84
2.	Program Pemberdayaan	256.476.000	942.015.000	696.870.300	863.936.500	997.769.800	252.255.750	902.661.300	620.605.000	817.636.980	916.211.877	98,35	96	89,05	94,64	91,82	82,41	84,68

Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan																		
3.	Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut	180.213.700	323.458.700	278.357.300	277.126.000	113.037.500	147.743.900	319.638.700	277.722.300	275.516.763	109.033.400	81,99	99	99,78	98,34	94,25	129,38	128,70
4.	Program Peningkatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat	52.567.700	107.917.700	177.503.700	96.250.000	78.342.000	45.457.700	107.127.700	177.168.700	90.970.000	73.876.200	88,47	99	99,81	94,51	94,25	104,20	105,20
5.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	4.146.314.500	5.852.912.136	6.082.716.900	5.806.279.500	7.900.102.800	3.870.910.230	5.731.498.060	6.000.750.700	5.752.649.400	6.845.467.750	93,36	98,90	98,65	99,08	86,65	86,33	87,85
6.	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	160.455.000	0	0	87.024.000	147.017.500	150.065.400	0	0	81.329.000	133.824.900	93,52	0	0	93,46	91,03	39,80	40,19
7.	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	345.942.000	2.481.239.747	1.025.656.800	912.029.000	1.201.745.300	340.347.200	2.166.781.207	894.944.409	717.319.000	1.161.951.828	98,38	80	87,25	78,65	95,97	111,05	111,08
8.	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar	72.717.900	102.362.900	244.297.000	615.410.500	232.670.700	47.176.100	92.170.000	234.256.700	613.202.680	231.899.300	64,88	90	95,89	99,64	99,65	104,28	98,29

Dari Tabel 2.2. di atas dapat menggambarkan bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi sangat besar, hal ini disebabkan karena pada tahun 2012 dan tahun 2015 Dinas Perikanan mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga rata-rata pertumbuhan sangat timpang pada tahun-tahun yang tidak mendapatkan Dana Alokasi Khusus. Selain itu juga ketimpangan ini dimungkinkan kurang matangnya perencanaan awal. Oleh karena itu pada tahun-tahun yang akan datang perlu ditingkatkan lagi sinkronisasi antara RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan Penyusunan RKA.

2.4. Tantangan dan Peluang Dinas Perikanan

A. Analisis Renstra Dinas Provinsi dan Renstra Kementerian

Sebagai upaya mendorong Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi lembaga yang mampu menjalankan peran, tugas pokok dan fungsinya ditengah dinamika pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus mempunyai strategi pencapaiannya yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Berdasarkan analisis terhadap Renstra Dinas Perikanan Provinsi Jambi dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka dapat dibandingkan capaian Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Sasaran Renstra Dinas Perikanan Provinsi Jambi dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dalam Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap Sasaran Dinas Perikanan Provinsi Jambi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

No	Indikator Kinerja	Capaian sasaran Renstra OPD	Sasaran pada Renstra OPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jumlah Produksi Perikanan	30.581	787.868	110.865.730
	1. Produksi Perikanan Tangkap Laut dan Umum (Ton)	27.347	385.273	33.175.730
	2. Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.234	376.667	47.390.000
			(Akumulasi Jumlah Produksi Tahun 2017-2021)	(Akumulasi Jumlah Produksi Tahun 2015-2019)
2.	Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kapita/Tahun)	34,00	36,01 Jumlah pada Renstra Tahun 2016	54,49 (Jumlah pada akhir Renstra)
3.	Peningkatan Kualitas :Lingkungan Wilayah Pesisir dan laut (%)	12,10	0 (Tidak Terdapat Indikator pada Renstra OPD Provinsi)	15 (Rata-rata pada akhir Renstra KKP)
4.	Peningkatan Pendapatan			
	1. Nelayan	2.100.000	Renstra Menggunakan Satuan Persentase dengan Rata-rata peningkatan sebesar 5%	Renstra Menggunakan Satuan Persentase dengan Rata-rata peningkatan sebesar 7%
	2. Pembudidaya	2.000.000		
	3. Pemasar	2.400.000		
	4. Pengolah Hasil Perikanan	2.100.000		
5.	Jumlah Produksi Benih Ikan (Ekor)	476.000 (Jumlah pada Tahun 2015)	2.497.000.000 (Akumulasi Jumlah Produksi Tahun 2017-2021)	0 (Sasaran KKP berorientasi pada induk ikan yang bersertifikat)
6.	Masyarakat yang mendapatkan Pelatihan/Pembinaan (Orang)	5.185	Tidak Terdapat Indikator	Tidak Terdapat Indikator
7.	Penyerapan Tenaga Kerja Bidang Kelautan dan Perikanan (Orang)	Rata-rata kenaikan sebesar 11%	10	15
8.	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan (Kelompok)	83	120	Tidak terdapat Indikator
9.	Jumlah Unit Pembenihan rakyat (Unit)	4	Tidak Terdapat Indikator	Tidak terdapat Indikator

10.	Jumlah KUB Nelayan (kelompok)	85	Dalam Renstra Indikatornya adalah jumlah RTP Perikanan Tangkap	Tidak terdapat Indikator
11.	Jumlah Pengolah (Orang)	187	567	3.765
12.	Jumlah Pemasar (Orang)	296	837	Tidak terdapat Indikator
13.	Jumlah POKMASWAS (Kelompok)	4	364	1.020
14.	Jumlah Kawasan Konservasi/Reservat (Lokasi)	5	225	349
15.	Jumlah Kawasan Minapolitan	0 (tidak terealisasi, dikarenakan Lokasi tidak sesuai dengan RTRW)	4	Tidak terdapat Indikator
16.	Jumlah Armada Perikanan Tangkap	962	9.031	Tidak terdapat Indikator
17.	Jumlah TPI	1	2	Tidak terdapat Indikator (TPI kewenangan berada pada Provinsi)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil analisis menunjukkan keterkaitan antara Renstra Dinas Kabupaten, Renstra Dinas Provinsi dan Kementerian masih kurang sinkron, karena masih ada sasaran antara dinas kabupaten dan dinas provinsi yang tidak mengikuti sasaran kementerian, selain itu capaian sasaran masih cukup jauh. Oleh karena itu dengan adanya analisis tersebut menjadi pedoman kepada Dinas Kabupaten dan Propinsi untuk lebih mempedomi dan mengikuti apa yang telah menjadi sasaran Kemnterian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Analisis RTRW

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan budidaya.

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang *eksisting*, maka setiap Perangkat Daerah, khususnya Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW dapat dilihat dalam Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Rencana Pola Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kawasan Peruntukan Perikanan Tangkap	a. kawasan perikanan tangkap sungai dengan luas kurang lebih 25.500 (dua puluh lima ribu lima ratus) hektar dengan komoditas unggulan terdapat unggulan Ikan Baung, Ikan Sepat, Ikan Siam, Ikan Gabus, Ikan Lele, Ikan Betok, Ikan Tambakan, Ikan Belidas, Ikan Lais, dan Udang di Kecamatan Seberang Kota,	Program pada Dinas Perikanan untuk mengcover Rencana Pola Ruang adalah Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Kebutuhan OPD mengacu pada RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan berdsarkan Data di Lapangan, pemanfaatan perairan umum tidak hanya di Kecamatan Seberang Kota, Kec, Tungkal Ilir dan Kec. Kuala Betara,	a. Kec. Seberang Kota, Kec. Tungkal Ilir, Kec. Kuala Betara, Kec. Senyerang, Kec. Pengabuan, Kec. Batang Asam, Kec. Betara dan Kec. Tungkal Ulu.

		Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Kuala Betara			akan tetapi perairan umum juga mempunyai potensi cukup besar di perairan umum Kec. Senyerang, Pengabuan, Batang Asam, Betara, dan Tungkal Ulu
		b. kawasan perikanan tangkap laut dengan jalur penangkapan ikan diatas 2 mil laut hingga 12 mil laut dengan luas kurang lebih 40.000 (empat puluh ribu) hektar dengan komoditas Ikan Kembung, Ikan Layang, Ikan Bawal Putih, Ikan Bawal Hitam, Ikan Kakap, Udang Putih, dan Udang terdapat di Kecamatan Pangabuan, Kecamatan Pangkal Duri dan Kecamatan Kuala Betara			
2.	Kawasan Peruntukan Perikanan Budi Daya	<p>a. Kawasan perikanan budidaya tambak dengan luas kurang lebih 5000 (lima ribu) hektar dengan komoditas unggulan Udang Windu, Udang Vaname dan Bandeng di Kecamatan Tungkal Ilir dan Kecamatan Kuala Betara;</p> <p>b. Kawasan Perikanan Budidaya kolam dengan luas kurang lebih 1000 (seribu) hektar dengan komoditas unggulan Ikan Nila, Ikan Patin, Ikan Bawal Air Tawar, Ikan Gurami dan Ikan Lele</p> <p>c. Kawasan Perikanan Budidaya jaring apung/keramba dengan luas kurang lebih 200 (dua ratus) hektar dengan komoditas unggulan Ikan Patin, Ikan Nila Tomang dan Udang Galah terdapat di Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Merlung, Kecamatan Betara dan Kecamatan Pengabuan.</p>	Program pada Dinas Perikanan untuk mengkover Rencana Pola Ruang ini adalah Program Pengembangan Perikanan Budidaya.	Sesuai UU No. 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dalam lampirannya UU tersebut menjelaskan bahwa Urusan Perikanan Budidaya sepenuhnya adalah urusan Kabupaten/Kota. Oleh sebab itu pengaruh adalah masalah di anggaran yang akan datang, dimana selama ini penganggaran untuk kegiatan budidaya masih relative kecil, dimana luas daerah untuk budidaya cukup luas.	Lokasi Kegiatan diarahkan pada semua 13 Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3.	Kawasan Peruntukan Perikanan;	Pengolahan Kawasan peruntukan pengolahan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa dengan luas kurang lebih 100 (seratus) hektar terdapat di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Seberang Kota, dan Kecamatan Kuala Betara	Program pada Dinas Perikanan untuk mengkover Rencana Pola Ruang ini adalah Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan Program Pengembangan Perikanan Budidaya.	Kebutuhan Dinas Perikanan adalah menjadikan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan yang ada saat ini dijadikan sebagai UPTD.	Kec. Seberang Kota, Kec. Tungkal Ilir dan Kec. Kuala Betara

4..	Prasarana Perikanan	<p>a. pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) di Kecamatan Bram Itam;</p> <p>b. pengembangan pelabuhan perikanan Kuala Tungkal Kecamatan Tungkal Ilir;</p>	<p>Program pada Dinas Perikanan untuk mengkover Rencana Pola Ruang ini adalah Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Program Pengembangan Perikanan Tangkap</p>	<p>Kebutuhan Dinas Perikanan adalah adanya perencanaan pembangunan BBI di daerah Ulu dan adanya perencanaan pembangunan PPI di Kecamatan Kuala Betara untuk mendukung Minapolitan Tangkap</p>	<p>Kec. Baram Itam, Kec. Tuangkal Ilir, Kec. Batang Asam dan Kec. Kuala Betara</p>
5.	Kawasan Minapolitan	<p>Struktur ruang saat ini perencanaan minalpolitan berada di Kecamatan Tungkal Ilir, tepatnya di PPI Parit 7</p>	<p>Program pada Dinas Perikanan untuk mengkover Rencana Pola Ruang ini adalah Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</p>	<p>Pengaruh Rencana Pola Runag yang baru dan yang lama penetapan kawasan minalpolitan tidak sama, sehingga sampai saat ini hanya baru perencanaannya saja dalam pembangunan Minapolitan. Oleh karena itu harus ada revisi RTRW</p>	<p>Kec. Tungkal Ilir dan Kecamatan Pendukung adalah Kec. Seberang Kota, Kec. Bram Itam dan Kec. Kuala Betara</p>

Tabel 2.5.
Hasil Telaah Pola Ruang Wilayah Provinsi Jambi

No	Rencana Pola Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1. Kawasan Lindung	Struktur Ruang saat ini Kawasan lindung menurut tugas dan fungsi dari dinas Perikanan adalah adalah pengawasan terhadap Kawasan konservasi/Reservat perikanan yang sampai saat ini ada lima lokasi yang tersebar di Kec. Tungkal Ilir, Kec. Seberang Kota, Kec. Kuala Betara, Kec. Betara dan Kec. Tungkal Ulu	Program pada Dinas Perikanan untuk mengkover Rencana Pola Ruang ini adalah Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Sesuai UU No. 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, OPD Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan lagi dalam pengawsan di pesisir dan laut, dan hanya diarahkan pada perairan umum	Kec. Renah Mendaluh, Kec. Pengabuan, Kec. Muara Paplik, Kec. Senyerang dan Kec. Merlung
2. Kawasan Budidaya	Kawasan Budidaya mencakup kawasan untuk perikanan, termasuk perikanan budidaya dan perikanan tangkap.	Program pada Dinas Perikanan untuk mengkover Rencana Pola Ruang ini adalah Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pengaruhnya terhadap pelayan OPD adalah terbatasnya Pengelolaan perikanan tangkap dan terbatasnya pendanaan pada pengembangan perikanan Budidaya	Lokasi Kegiatan diarahkan pada semua 13 Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dari hasil telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) antara Kabupaten dan Provinsi sebagian besar telah mencakup dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan, akan tetapi masih ada yang belum sesuai dengan rencana Pola Ruang Pengembangan Perikanan Tangkap, Pengawasan Perikanan dan Pengembangan Minapolitan yang tidak sesuai dengan RTRW kabupaten yang lama.

BAB III.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2011–2016 dapat memberikan manfaat maupun dampak positif yang bisa dirasakan oleh nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan, tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala yang dihadapi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat dalam Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel. 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

No.	Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
				Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	IKU	Belum tercapainya target produksi perikanan tangkap (Laut dan Umum)	LAKIP	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan terhadap nelayan masih minim - Belum optimalnya pemanfaatan bantuan kapal INKA MINA >30 GT dari pusat 	<ul style="list-style-type: none"> - Faktor alam yang tidak bisa diprediksi - Rendahnya SDM nelayan penangkapan ikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya anggaran dalam peningkatan produksi perikanan tangkap - Masih terbatasnya SDM yang berlatar belakang pendidikan perikanan tangkap. -
2.	IKU	Belum maksimalnya pemanfaatan potensi budidaya ikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat	LAKIP	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan budidaya ikan belum maksimal dilaksanakan. - Belum sepenuhnya mengembangkan potensi perikanan budidaya sebagai prioritas pengembangan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak banyak masyarakat yang tertarik pada usaha budidaya ikan - Peran PPL masih rendah dalam membantu dinas teknis dalam pembangunan perikanan - Kondisi alam yang terutama kesediaan air dan kualitas air yang harus perlu dikaji - 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya anggaran dalam peningkatan produksi perikanan budidaya. - Masih terbatasnya SDM yang berlatar belakang pendidikan perikanan budidaya.
3	IKU	Belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat pesisir dalam peningkatan pendapatan	LAKIP	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu ditingkatkan lagi pemberdayaan masyarakat pesisir, dengan harapan masyarakat pesisir punya kemandirian dalam peningkatan pendapatan - Masih sulitnya menanamkan mindset kepada nelayan untuk menabung 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan dari pemerintah daerah harus meningkat, karena peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir masih stagnan dari tahun ke tahun - Masih buruknya infrastruktur jalan, pelabuhan, air bersih yang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih belum akuratnya data tentang masyarakat pesisir, sehingga kebijakan pembangunan yang diarahkan masih belum sepenuhnya tepat sasaran

4.	IKU	Masih adanya pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan baik di laut maupun di perairan umum	LAKIP	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu ditingkatkan sosialisasi perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan dengan harapan masyarakat paham dengan pemanfaatan sDKP yang berwawasan lingkungan - Masih kurangnya kelompok pengawas masyarakat swakarsa, sedangkan tenaga pengawas di Dinas sangat minim 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih sangat terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan dengan luas lokasi yang cukup luas - Harus berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai pemanfaatan SDKP 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya anggaran pengawasan - Sangat terbatasnya tenaga pengawas perikanan
5.	IKU	Masih minimnya pengolahan hasil perikanan yang bersertifikat halal dan berlabel	Laporan Statistik Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya koordinasi antar instansi teknis dengan instansi lain, sehingga seakan-akan jalan ditempat - Masih belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran yang sudah ada - Masih rendahnya pembinaan masyarakat pengolahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pembinaan dan pemasaran hasil perikanan - Masih rendahnya pihak bank dalam memberikan bantuan modal kepada pengolah hasil 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih minimnya anggaran dalam kegiatan ini - Belum optimalnya aparatur memanfaatkan potensi ini - Masih kurangnya tenaga Pembina pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
6.	IKU	Belum tercapainya target benih ikan lokal	Laporan Statistik perikanan dan LAKIP	<ul style="list-style-type: none"> - Hanya ikan tertentu yang bisa di bertahan hidup di BBI Kabupaten - Faktor lingkungan terutama kualitas air yang tidak menentu - Masih minimnya tenaga ahli pembenihan 	<ul style="list-style-type: none"> - Harus ada kajian kualitas air oleh BLHD atau Balitbangda - Diharapkan ada pembangunan BBI baru di daerah Ulu dengan sumber air yang lebih bagus - Memperbanyak pembinaan/pembentukan UPR mandiri dalam mendukung peningkatant benih ikan lokal 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu adanya peningkatan pengetahuan tenaga teknis budidaya - Harus menyusun SOP budidaya ikan - Perbaiki sarana dan prasarana pendukung pembenihan local baik di BBI maupun UPR.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi Pembangunan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama kurun waktu 2016-2021 telah menetapkan Visi Pembangunan yaitu :

VISI

TERWUJUDNYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT YANG MAJU, ADIL, MAKMUR, BERMARTABAT DAN BERKUALITAS

Adapun deskripsi dari visi tersebut adalah:

Maju : Mengandung makna bahwa daerah yang memiliki standar hidup relatif tinggi serta ekonomi merata. Pendapatan masyarakat meningkat melalui pengembangan industri dan ekonomi

kerakyatan.

- Adil** : Mengandung makna bahwa kondisi yang ideal secara moral dan material. Anggaran daerah yang pro rakyat meningkat. Terwujudnya pemerataan pembangunan sesuai dengan pengembangan potensi daerah. Penciptaan ruang pembangunan yang lebih adil bagi rakyat. Pelayanan informasi publik yang berimbang dan transparan.
- Makmur** : Mengandung makna bahwa kehidupan masyarakat sejahtera yang terlihat dari menurunnya rasio kemiskinan dan terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.
- Bermartabat** : Mengandung makna bahwa suatu kondisi manusia ideal dimana terpenuhinya penghargaan dan segala hak asasi manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat dan derajat, kelengkapan itu mampu mewujudkan cipta rasa dan karyanya yang nyata.
- Berkualitas** : Mengandung makna bahwa meningkatnya taraf hidup masyarakat yang tergambar pada peningkatan pendapatan dan terjamin pelestarian lingkungan hidup.

3.2.2. Misi Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Daerah tersebut di atas, maka ditetapkan 4 (empat) Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan.

4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan daerah melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

3.2.3. Tujuan dan Sasaran

3.2.3.1. Tujuan Pembangunan Daerah

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu selaras dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah :

- 1) Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas.
- 2) Membangun kawasan khusus produksi dan sentra pengembangan ekonomi.
- 3) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas.
- 4) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.
- 6) Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui investasi daerah dan daya serap tenaga kerja.
- 7) Meningkatkan daya saing agroindustri dan perikanan melalui ekonomi kerakyatan.
- 8) Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat dalam beragama dan berbudaya.
- 9) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan.
- 10) Meningkatkan kepastian hukum dan demokrasi.

3.2.3.2. Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, maka ditetapkan 36 (tiga puluh enam) sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan dalam lima tahun kedepan yang bentuk arahnya sebagai berikut :

- 1) Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas untuk meningkatkan aksesibilitas dan daya saing daerah.
- 2) Pembangunan pusat pembangkit tenaga dan jejaring listrik dan pusat pengolahan air bersih bagi seluruh daerah.
- 3) Pembangunan jaringan telekomunikasi daerah tanpa kabel bagi seluruh daerah terpencil.
- 4) Peningkatan sistem administrasi kearsipan dan layanan informasi daerah.
- 5) Peningkatan kepastakaan daerah.
- 6) Pembangunan kawasan khusus untuk agroindustri.
- 7) Pembangunan kawasan khusus produksi untuk sentra tanaman pangan padi-padian dan perikanan.
- 8) Pengembangan wilayah administrasi dan tata kelola pemerintahan.
- 9) Pembangunan sentra pengembangan ekonomi pada kecamatan.
- 10) Meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
- 11) Peningkatan kualitas pendidikan melalui ketersediaan infrastruktur pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas.
- 12) Peningkatan kualitas tenaga kerja yang memiliki ketrampilan dan bersertifikasi melalui proses pendidikan yang berkualitas.
- 13) Pembangunan pendidikan menengah umum dan kejuruan yang berbasis pada teknologi dan berkualitas.

- 14) Peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan fisik dan non fisik yang berkualitas.
- 15) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas.
- 16) Peningkatan kualitas gizi keluarga dan pemberantasan penyakit menular maupun tidak menular.
- 17) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup.
- 18) Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.
- 19) Peningkatan kearifan lokal dalam menjamin keberlanjutan ekosistem.
- 20) Peningkatan investasi daerah melalui penyediaan infrastruktur yang berkualitas.
- 21) Peningkatan daya serap tenaga kerja pada sektor ekonomi kerakyatan.
- 22) Peningkatan daya saing agroindustri dan perikanan.
- 23) Peningkatan peran koperasi dan UMKM dalam pengelolaan agroindustri dan perikanan.
- 24) Peningkatan kesejahteraan pekerja agroindustri dan perikanan untuk pengurangan kesenjangan dan kemiskinan.
- 25) Peningkatan jaminan dan pemasaran barang serta jasa.
- 26) Peningkatan pemasaran produk unggulan daerah.
- 27) Peningkatan pertumbuhan ekonomi makro dari sektor unggulan.
- 28) Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya.
- 29) Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas.
- 30) Peningkatan kualitas kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas.
- 31) Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui sistem *online* dan transparan.

- 32) Peningkatan kualitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabilitas.
- 33) Peningkatan transparansi pengelolaan keuangan publik yang berbasis pada *e-Government* dan *e-Budgeting*.
- 34) Peningkatan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.
- 35) Peningkatan peran partai politik dalam demokrasi daerah.
- 36) Peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Untuk lebih jelasnya, keterkaitan antara Misi, Tujuan dan sasaran pokok pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2016-2021 disajikan dalam bentuk matrik (lihat Tabel 3.2) berikut ini :

Tabel 3.2.
Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT YANG MAJU, ADIL, MAKMUR, BERMARTABAT DAN BERKUALITAS					
No	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR PENILAIAN	TARGET AKHIR
1	MISI I : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN UMUM MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN KAWASAN EKONOMI YANG BERKUALITAS	1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas	1. Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas untuk meningkatkan aksesibilitas dan daya saing daerah	Membuka akses Daerah terisolir dan Tertinggal	85%
			2. Pembangunan pusat pembangkit tenaga dan jejaring listrik dan pusat pengolahan air bersih bagi seluruh daerah	Rumah Tangga Dialiri Listrik dan air bersih yang memadai	80%
			3. Pembangunan jaringan telekomunikasi daerah tanpa kabel bagi seluruh daerah terpencil	Desa Terjangkau komunikasi Internet	90%
			4. Peningkatan sistem administrasi kearsipan dan	Terbentuknya Jejaring informasi dan sistem	80%

			layanan informasi daerah	administrasi Pemerintah Daerah	
			5. Peningkatan Kepustakaan Daerah	Akses Masyarakat ke Perpustakaan	80%
		2. Membangun kawasan khusus produksi dan sentra pengembangan ekonomi	6. Pembangunan kawasan khusus untuk Industri dan agroindustri	Pembangunan Zona Industri	1 Lokasi
			7. Pembangunan kawasan khusus produksi untuk sentra tanaman pangan padi-padian dan perikanan	Pembentukan Sentra Produk Unggulan Holtikultura	13 Sentra
			8. Pengembangan wilayah administrasi dan tata kelola pemerintahan.	Peningkatan Kewenangan Pengembangan Ekonomi di Kecamatan	13 Kecamatan
			9. Pembangunan sentra pengembangan ekonomi pada Kecamatan	Perluasan Kawasan Ekonomi Cepat Tumbuh	80%
			10. Meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan publik dan pembangunan daerah	Masyarakat Puas dengan Layanan Pemerintah Daerah	80%

VISI : Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat Dan Berkualitas

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR PENILAIAN	TARGET AKHIR
2	MISI II : MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas	11. Peningkatan kualitas pendidikan melalui ketersediaan infrastruktur pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas	Fasilitas dan Infrastruktur Pendidikan dalam kondisi baik disertai tenaga pendidik yang memadai	85%
			12. Peningkatan kualitas tenaga kerja yang memiliki ketrampilan dan bersertifikasi melalui proses pendidikan yang berkualitas	Penempatan Tenaga Kerja Bersertifikasi	30%
			13. Pembangunan pendidikan menengah umum dan kejuruan yang berbasis pada teknologi dan berkualitas	Angka Pengangguran	Kurang Dari 5%
		4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas	14. Peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan fisik dan non fisik yang berkualitas	Terpenuhinya SPM Fasilitas Kesehatan Pemerintah	100%
			15. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas	Masyarakat Puas Dengan Pelayanan Fasilitas Kesehatan	80%

				Pemerintah	
			16. Peningkatan kualitas gizi keluarga dan pemberantasan penyakit menular maupun tidak menular	Terbentuknya Desa Siaga ber PHBS	90%
		5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	17. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup	Partisipasi Masyarakat dan Swasta dalam Kegiatan Kelestarian Lingkungan Hidup	85%
			18. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Peningkatan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan	85%
			19. Peningkatan kearifan lokal dalam menjamin keberlanjutan ekosistem	Keterlibatan unsur-unsur masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pem- bangunan	60%

VISI : Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat Dan Berkualitas

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
----	------	--------	---------	-----------	--------

				PENILAIAN	AKHIR
3	MISI III : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI AGROINDUSTRI DAN PERIKANAN.	6. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui investasi daerah dan daya serap tenaga kerja	20. Peningkatan investasi daerah melalui penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Peningkatan Nilai Investasi	5%
			21. Peningkatan daya serap tenaga kerja pada sektor ekonomi kerakyatan	Perluasan Kesempatan Kerja	5%
		7. Meningkatkan daya saing agroindustri dan perikanan melalui ekonomi kerakyatan	22. Peningkatan daya saing agroindustri dan perikanan	Peningkatan produksi pertanian dan perikanan	14%
			23. Peningkatan peran koperasi dan UMKM dalam pengelolaan agroindustri dan perikanan	Pertumbuhan Koperasi Aktif	8%
			24. Peningkatan kesejahteraan pekerja agroindustri dan perikanan untuk pengurangan kesenjangan dan kemiskinan	Angka Kemiskinan	Kurang Dari 11%
			25. Peningkatan jaminan dan pemasaran barang serta jasa	Peningkatan Kelancaran Angkutan Barang dan Jasa	70%

			26. Peningkatan pemasaran produk unggulan daerah	Peningkatan Pemasaran Komoditi Unggulan Daerah	20%
			27. Peningkatan pertumbuhan ekonomi makro dari sektor unggulan	PDRB	8,9%

VISI : Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat Dan Berkualitas					
No	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR PENILAIAN	TARGET AKHIR
4	MISI IV: MENINGKATKAN PERSATUAN DAN KESATUAN DAERAH MELALUI HARMONISASI KEHIDUPAN BERAGAMA DAN BERBUDAYA, SUPREMASI HUKUM DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	8. Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat dalam beragama dan berbudaya	28. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya	Pengelolaan kekayaan dan peningkatan keragaman serta pengembangan nilai budaya	75%
			29. Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas	Partisipasi pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat dalam pembangunan	85%
			30. Peningkatan kualitas kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas	Pembinaan Kelompok Agama, Budaya dan Kepemudaan serta Olah Raga	85%

	9. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan	31.Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui sistem online dan transparan	Setiap OPD memiliki dan menerapkan SOP yang mudah diakses masyarakat .	80%
		32. Peningkatan kualitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabilitas	Menurunnya Pengaduan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik	30%
		33. Peningkatan transparansi pengelolaan keuangan publik yang berbasis pada <i>e-Government</i> dan <i>e-Budgeting</i>	Opini BPK atas Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP
	10. Meningkatkan kepastian hukum dan demokrasi	34.Peningkatan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha	Pelayanan Perijinan sesuai Standard	90%
		35.Peningkatan peran partai politik dalam demokrasi daerah	Partisipasi Masyarakat dalam setiap Tahapan Pemilu	85%
36.Peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan		Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan daerah	80%	

			daerah		
--	--	--	--------	--	--

Mengacu pada tabel di atas dapat tergambar bahwa secara teknis Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan menjalankan Misi ketiga. Hal ini merupakan peluang dan tantangan kepada Dinas Perikanan untuk mewujudkan misi tersebut. Secara sadar tantangan dan peluang tersebut tidak lepas dari beberapa faktor penghambat dan pendorong di masa yang akan datang. Secara rinci factor penghambat dan pendorong pelayanan OPD terhadap capaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diuraikan dalam Tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap
Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat Dan Berkualitas

No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<p>1. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI AGROINDUSTRI DAN PERIKANAN.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Masih sangat rendahnya investor yang mau berinvestasi di bidang kelautan dan perikanan. - Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja di bidang perikanan terutama di bidang usaha perikanan budidaya perikanan, padahal potensi budidaya sangat berpeluang untuk dikembangkan - Masih rendahnya daya saing peningkatan produksi perikanan, terutama pada pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya. - Koperasi dan UMKM yang bergerak dibidang perikanan cukup banyak akan tetapi permasalahannya adalah hanya sedikit sekali koperasi atau UMKM yang berbadan hukum. - Belum adanya pemetaan daerah mana saja yang harus menjadi prioritas pembangunan, khususnya pembangunan di bidang kelautan dan perikanan, karena untuk mengurangi kesenjangan Dinas Perikanan tidak bisa sendiri - Masih rendahnya inovasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, sehingga hasil produksi masih sebatas local dan belum bisa menarik pelanggan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya infrastruktur dan sarana-prasarana pembangunan perikanan dan kelautan, sehingga investor belum mau menanamkan modalnya di bidang kelautan dan perikanan, selain itu secara geografis, cost untuk membangun usaha perikanan menjadi pertimbangan. - Masyarakat masih sangat berminat pada usaha perkebunan dan pertanian, hal ini berdasarkan data tambak yang dulu sangat produktif, sekarang tambak beralih fungsi menjadi kebun maupun sawah - Masih kurangnya SDM dan kemauan masyarakat dalam mengembangkan inovasi hasil dan pemasaran - Sebagian besar koperasi dan UMKM hanya jalan di tempat, hal ini kemungkinan disebabkan karena tidak ada inovasi yang menjanjikan - Belum akuratnya data, sehingga untuk memetakan prioritas pembangunan masih sebatas usulan dari masyarakat tanpa memperhatikan daerah mana yang menjadi prioritas - Masyarakat masih nyaman dengan pola usaha yang ada tanpa memperhatikan daya saing produk, sehingga produk di daerah hanya 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya program bupati dan wakil bupati terpilih yang konsen pengembangan di bidang kelautan dan perikanan - Potensi perikanan yang cukup bagus untuk dikembangkan, sehingga diharapkan kedepan masyarakat tidak hanya tergantung oleh perkebunan dan pertanian - Cukup banyaknya potensi SDM yang berkompeten untuk dibina dalam menciptakan inovasi yang mempunyai nilai ekonomi - Cukup banyaknya koperasi dan UMKM Perikanan dan kelautan, sehingga ini menjadi pendorong untuk peningkatan kesejahteraan di bidang kelautan dan perikanan - Masih ada waktu untuk memetakan daerah prioritas pembangunan untuk mengurangi kesenjangan, karena kita sudah bekerja sama dengan tiga universitas yang sudah diakui kualitasnya. 	

sebatas local.

3.3. Telaah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I, Renstra Dinas Perikanan Provinsi Jambi, Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

3.3.1. Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

Rencana Strategis Dinas Perikanan tidak terlepas dari Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana Renstra KKP telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 – 2019.

3.3.1.1. Visi

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, khususnya Rencana Strategis, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan selama kurun waktu 2015-2019 telah menetapkan Visi Pembangunan yaitu :

“MEWUJUDKAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, KUAT DAN BERBASIS KEPENTINGAN NASIONAL”

Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

3.3.1.2. Misi

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi **misi KKP** yakni :

1. **Kedaulatan (*Sovereignty*)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. **Keberlanjutan (*Sustainability*)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. **Kesejahteraan (*Prosperity*)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

3.3.1.3. Tujuan

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
2. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.

Keberlanjutan (*Sustainability*)

3. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut
4. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
5. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan

Kesejahteraan (*Prosperity*)

6. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
7. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan

3.3.1.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, KKP menjabarkan 3 misi yakni “**Kedaulatan**”, “**Keberlanjutan**”, dan “**Kesejahteraan**” dan menggunakan pendekatan metoda *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni *stakeholders prespective*, *customer prespective*, *internal process prespective*, dan *learning and growth prespective*.

3.3.1.5. Arah Kebijakan Dan Strategis Nasional

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan, (4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.

Kerangka pencapaian tujuan RPJMN 2015-2019 dirumuskan lebih lanjut dalam 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi social Indonesia.

Strategi pembangunan nasional yang terkait dengan tugas KKP adalah :

1. Agenda/Nawacita ke-1 :

Sub Agenda : Memperkuat Jati Diri sebagai Negara Maritim

- a. Meningkatkan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara terpadu.
- b. Menyempurnakan sistem penataan ruang nasional dengan memasukkan wilayah laut sebagai satu kesatuan dalam rencana penataan ruang nasional/regional.
- c. Menyusun dan mengimplementasikan Rencana Aksi Pembangunan Kelautan dan Maritim untuk penguasaan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan maritim untuk kesejahteraan rakyat.

- d. Meningkatkan sarana prasarana, cakupan pengawasan, dan peningkatan kelembagaan pengawasan sumber daya kelautan.
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan.
- f. Mengintensifkan penegakan hukum dan pengendalian *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* serta kegiatan yang merusak sumberdaya kalautan dan perikanan.

2. Agenda/Nawa Cita ke-4

Sub Agenda : Pemberantasan Perikanan Illegal/ IUU Fishing

- a. Peningkatan koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana perikanan.
- b. Penguatan sarana sistem pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- c. Penataan sistem perizinan usaha perikanan tangkap.
- d. Peningkatan penertiban ketaatan kapal di Pelabuhan Perikanan.

3. Agenda/Nawa Cita ke-6

Sub Agenda : Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Hasil Perikanan

1. Peningkatan mutu, nilai tambah dan inovasi teknologi perikanan.
2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan.
3. Penyempurnaan tata kelola perikanan.
4. Pengelolaan perikanan berkelanjutan.

4. Agenda/Nawa Cita ke-7

Sub Agenda: Peningkatan Kedaulatan Pangan melalui Peningkatan Produksi Perikanan

- a. Ekstensifikasi dan intensifikasi usaha perikanan untuk mendukung ketahanan pangan dan gizi.
- b. Penguatan faktor input dan sarana prasarana pendukung produksi.

- c. Penguatan keamanan produk pangan perikanan.
- d.

Sub Agenda : Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan

- a. Pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.
- b. Penyediaan data dan informasi sumberdaya kelautan yang terintegrasi (*one map policy*) dalam rangka mendukung pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut.
- c. Pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut.
- d. Pengembangan SDM dan IPTEK kelautan yang berkualitas dan meningkatnya wawasan dan budaya bahari.
- e. Peningkatan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir.

3.3.1.6. Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 ditetapkan dengan memperhatikan 3 dimensi pembangunan nasional, yakni SDM, sektor unggulan, dan kewilayahan. Sektor kelautan dan perikanan telah dijadikan sektor unggulan nasional, yang penjabarannya dilaksanakan KKP dengan pendekatan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir, peran KKP yang dimandatkan dalam peraturan perundangundangan, serta tugas KKP dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional/Nawa Cita.

Arah kebijakan KKP disusun menjabarkan 3 pilar dalam misi pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut :

1. Kebijakan Pokok

- a. **Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.**

Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/NawaCita ke-1 dan ke 4, serta menjabarkan misi KKP yang terkait dengan kedaulatan.

b. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/Nawa Cita ke-6 dan ke-7, serta menjabarkan misi KKP yang terkait dengan keberlanjutan.

c. Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.

Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/Nawa Cita ke-6 dan ke-7, serta menjabarkan misi KKP yang terkait dengan kesejahteraan.

2. Kebijakan Lintas Bidang

- a. Pengarusutamaan Gender
- b. Pembangunan Kewilayahan
- c. Adaptasi Perubahan Iklim
- d. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

3.3.1.7. Program Pemabangunan KKP

Arah kebijakan, strategi dan langkah operasional tersebut di atas, akan dilaksanakan melalui 10 program pembangunan kelautan dan perikanan, yakni :

1. Program Pengelolaan Ruang Laut
2. **Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap**
3. **Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya**
4. **Program Penguatan Daya Saing dan Sistem Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan**
5. **Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**
6. Program Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

7. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
8. Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
9. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP
10. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP

3.3.1.8. Quick Wins dan Program Lanjutan KKP

Pelaksanaan agenda pembangunan nasional dalam Nawa Cita dituangkan dalam **Quick Wins** dan **Program Lanjutan Lainnya**, yang ditugaskan kepada setiap K/L. *Quick wins* merupakan langkah inisiatif yang mudah dan cepat dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang dijalankan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

Quick wins yang akan dilakukan antara lain adalah:

- a. Membangun Gerakan Nelayan Hebat
- b. Membangun Gerakan Kemandirian Pembudidaya Ikan
- c. Gerakan Cinta Laut dan Rehabilitasi Kawasan PANTURA Jawa
- d. Gerakan Ekonomi Kuliner Rakyat Kreatif dari Hasil Laut
- e. Pembangunan Techno Park berbasis Perikanan Rakyat
- f. Mendukung operasi keamanan laut di perairan perbatasan
- g. Realokasi subsidi solar menjadi LPG ke nelayan, berkoordinasi dengan Kementerian ESDM

Disamping *quickwins*, terdapat program lanjutan lainnya yang menjadi tugas KKP antara lain:

- a. Peningkatan produksi kelautan dan perikanan dua kali lipat menjadi sekitar 40-50 juta ton pada tahun 2019, pembangunan 100 sentra perikanan terpadu dan penerapan *Best Aquaculture Practices*.
- b. Pemberantasan *IUU fishing*.
- c. Rehabilitasi kerusakan pesisir, pengelolaan kawasan konservasi perairan, penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dan peningkatan kesejahteraan di pulau-pulau kecil terluar (PPKT).

Berdasarkan uraian di atas dapat di analisis keterkaitan antara Renstra K/L dengan Renstra Dinas Perikanan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4.
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten berdasarkan Sasaran Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan (Laut, Perairan Umum dan Budidaya)	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pemanfaatan armada penangkapan ikan >30 GT - Masih banyaknya nelayan yang masih menggunakan alat penangkapan sederhana - Sebahagian besar armada penangkapan ikan nelayan masih <3 GT, sehingga sangat terbatas ruang penangkapannya - Masih rendahnya pengetahuan nelayan tentang teknologi penangkapan ikan - Belum optimalnya pemanfaatan potensi budidaya ikan - Masih rendahnya teknologi budidaya ikan - Masih sedikitnya minat masyarakat untuk usaha budidaya ikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Proses kepengurusan Izin penangkapan kapal .30 GT harus kepusat dan sangat lama izin terbitnya - Minimnya anggaran utuk revatalisasi alat penangkapan ikan yang modrn dan ramah lingkungan - Minimnya anggaran untuk pengadaan kapal lebih besar dari 3 GT - Factor lingkungan yang menjadi kendala utama belum optimalnya pemanfaatan potensi budidaya ikan - Tenaga ahli masih kurang, sehingga belum bisa melayani sekian banyak pembudidaya ikan - Masih belum optimalnya penanganan pasca panen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi harus lebih ditingkatkan supaya kepengurusan perizinan segera terbit - Inovasi alat penangkapan ikan mempunyai peluang untuk dikembangkan - Revatalisasi armada penangkap ikan dengan permohonan bantuan ke provinsi dan pusat - SDM nelayan ada, sehingga potensi untuk dikembangkan masih berpeluan - Potensi budidaya cukup luas, dan masih sedikit yang dimanfaatkan, ad ape;uang besar dalam pengembangan perikanan budidaya - Kajian dan pembinaan bisa bekerja sama dengan instansi yang kompeten di bidang perikanan budidaya - Pengembangan pasar dan penanganan pasca panen harus ditingkatkan guna

				peningkatan kesejahteraan masyarakat
2.	Meningkatnya Konsumsi Ikan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Data yang belum akurat - Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi ikan - Masih banyak masyarakat yang tidak suka mengkonsumsi ikan 	<ul style="list-style-type: none"> - SDM pendata masih sangat terbatas - Masih minimnya himbauan kepada masyarakat akan pentingnya makan ikan - Kurangnya inovasi pengolahan hasil ikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Harus ada kerja sama dengan BPS untuk mendapatkan data yang akurat - Sumberdaya ikan cukup banyak dan lebih murah dan tanpa ada resiko penyakit yang mematikan - Pasar yang sangat menjanjikan terhadap hasil pengolahan perikanan
3.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Wilayah Pesisir	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan - Masih kurangnya sosialisasi/pembinaan kepada masyarakat tentang wawasan kemaritiman - Banyaknya tanaman mangrove yang ditebang - Masih adanya masyarakat dalam pemanfaatan SDKP dengan cara yang dilarang 	<ul style="list-style-type: none"> - Masalah ini tidak bisa Dinas Perikanan saja yang melaksanakan, harus lebih ditingkatkan koordinasi dengan instansi yang terkait - Sangat minimnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pembinaan masalah was an kemaritiman - Batang mangrove banyak dimanfaatkan untuk kepentingan rumah tangga - Petugas patrol sangat minim 	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi strategis untuk dikembangkan - Peningkatan peran serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan pihak akademis untuk embantu memberikan pengertian kepada masyarakat - Hampirsetiap tahun dilakukan penanaman mangrove - Perlu membentuk pengawas swakarsa masyarakat dalam mengawasi pelanggaran di lingkungan sekitarnya
4.	Meningkatnya Pendapatan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat ketidak akuratan data bidang kelautan dan perikanan dalam menentukan kebijakan pembangunan perikanan dan kelautan - Sangat susah merubah mainset nelayan cara hidup hemat dan gemar menabung - Masih minimnya minat masyarakat dalam usaha perikanan dan kelautan terutama usaha budidaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas statistic yang sangat terbatas - Masih rendahnya koordianasi antar pemangku kepentingan pada masyarakat di bidang kelautan dan perikanan - Kualitas lingkungan yang kurang bagus untuk usaha perikanan, khususnya perikanan budidaya dalam tambak 	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah dilakukan pendataan akan tetapi harus perlu ditingkatkan lagi - Peningkatan koordinasi dngan pemangku kepentingan - Melakukan kerja sama dengan instansi yang berkompeten dalam penelitian dan pengembangan potensi budidaya ikan
5.	Meningkatnya Jumlah Produksi Induk yang Bersertifikat	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga teknis Budidaya masih sangat terbatas - Perlu ada kajian pengembangan pembenihan di daerah yang mempunya sumber air lebih bagus daripada yang sekarang 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya anggaran dalam perekrutan tenaga teknis pembenihan - Lahan yang terbatas dalam pengembangan BBI baru 	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi yang cukup besar dalam pengemabangan - Harus ada kalian secara mendalam pada daerah yang dianggap layak dalam pengemabngan pembenihan
6.	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja di Bidang Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Masih belum meratanya bantuan perikanan dan kelautan kepada masyarakat - Masih minimnya pembinaan tentang usaha perikanan dan kelautan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendataan yang belum optimal - Masih banyak masyarakat yang menganggap usaha perikanan adalah sebagai usaha 	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi usaha perikanan dan kelautan yang cukup bagus - Masih ada minat masyarakat dalam usaha perikanan dan kelatan - Kerja sama dengan BPS

		yang sangat menjajikan	sampingan	harus perlu ditingkatkan
		- Masih belum akuratnya pendataan daerah prioritas pengembangan perikanan, khususnya perikanan budidaya	- Lokasi yang luas dengan petugas pendata yang sangat terbatas	
7.	Meningkatnya Jumlah Pengelola Hasil Perikanan	- Terbatasnya anggaran dalam pengemabngan pengelolaan dan inovasi hasil perikanan - Sangat sulitnya memanajemn pengolah yang ada untuk membentuk usaha kelompok bersama - Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang pengolahan dan pemasaran	- Usulan sering kali ditolak karena usulan dana untuk pegembangan dan inovasi pengolahan hasil perikanan cukup besar - Terrbatasnya SDM yang kompeten dibidang ini - Masih rendahnya pembinaan dan pelatihan pengolahan hasil	- Potensi cukup bagus untuk dikembangkan menjadi produk yang mempunyai nilai tambah - Perlu adanya kerjasama dengan pihak terkait yang berkompeten dalam masalah ini - Masih adanya minat masyarakat dalam pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan
8.	Meningkatnya Jumlah Kelompok Pengawas Masyarakat Swakarsa/Mandiri	- Masih kurangnya pembinaan kepada masyarakat dalam pengawasan perikanan mandiri	- Masih bnayak masyarakat yang enggan untuk menjadi anggota POKMASWAS	- Medan yang cukup luas yang tidak mungkin hanya diawasi oleh Dinas teknis yang SDMnya sangat terbatas

3.3.2. Telaah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi

Arah kebijakan dan strategi Dinas Perikanan Provinsi Jambi tahun 2016 - 2021 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan Pembangunan di Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi. Arah kebijakan akan dimplitasikan kedalam program dan kegiatan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jambi tahun 2016 - 2021 untuk menuju Jambi Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera (TUNTAS) sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.
2. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya.
3. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan .
4. Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan .
5. Pengelolaan Ruang Laut.

Untuk lebih jelasnya dalam menganalisis pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong keberhasilan penanganannya dapat dilihat dalam Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5.
Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Berdasarkan
Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra OPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan (Laut, Perairan Umum dan Budidaya)	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pemanfaatan armada penangkapan ikan >30 GT - Masih banyaknya nelayan yang masih menggunakan alat penangkapan sederhana - Sebahagian besar armada penangkapan ikan nelayan masih <3 GT, sehingga sangat terbatas ruang penangkapannya - Masih rendahnya pengetahuan nelayan tentang teknologi penangkapan ikan - Belum optimalnya pemanfaatan potensi budidaya ikan - Masih rendahnya teknologi budidaya ikan - Masih sedikitnya minat masyarakat untuk usaha budidaya ikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Proses kepengurusan lzin penangkapan kapal .30 GT harus kepusat dan sangat lama izin terbitnya - Minimnya anggaran untuk revatalisasi alat penangkapan ikan yang modrn dan ramah lingkungan - Minimnya anggaran untuk pengadaan kapal lebih besar dari 3 GT - Factor lingkungan yang menjadi kendala utama belum optimalnya pemanfaatan potensi budidaya ikan - Tenaga ahli masih kurang, sehingga belum bisa melayani sekian banyak pembudidaya ikan - Masih belum optimalnya penanganan pasca 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi harus lebih ditingkatkan supaya kepengurusan perizinan segera terbit - Inovasi alat penangkapan ikan mempunyai peluang untuk dikembangkan - Revatalisasi armada penangkapan ikan dengan permohonan bantuan ke provinsi dan pusat - SDM nelayan ada, sehingga potensi untuk dikembangkan masih berpeluan - Potensi budidaya cukup luas, dan masih sedikit yang dimanfaatkan, ad ape;uang besar dalam pengembangan perikanan budidaya - Kajian dan pembinaan bisa bekerja sama dengan instansi yang kompeten di bidang perikanan budidaya - Pengembangan pasar dan penanganan pasca panen harus ditingkatkan guna

			panen.	peningkatan kesejahteraan masyarakat
2.	Meningkatnya Konsumsi Ikan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Data yang belum akurat - Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi ikan - Masih banyak masyarakat yang tidak suka mengkonsumsi ikan 	<ul style="list-style-type: none"> - SDM pendata masih sangat terbatas - Masih minimnya himbauan kepada masyarakat akan pentingnya makan ikan - Kurangnya inovasi pengolahan hasil ikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Harus ada kerja sama dengan BPS untuk mendapatkan data yang akurat - Sumberdaya ikan cukup banyak dan lebih murah dan tanpa ada resiko penyakit yang mematikan - Pasar yang sangat menjanjikan terhadap hasil pengolahan perikanan
3.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Wilayah Pesisir	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan - Masih kurangnya sosialisasi/pembinaan kepada masyarakat tentang wawasan kemaritiman - Banyaknya tanaman mangrove yang ditebang - Masih adanya masyarakat dalam pemanfaatan SDKP dengan cara yang dilarang 	<ul style="list-style-type: none"> - Masalah ini tidak bisa DPK saja yang melaksanakan, harus lebih ditingkatkan koordinasi dengan instansi yang terkait - Sangat minimnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pembinaan masalah was an kemaritiman - Batang mangrove banyak dimanfaatkan untuk kepentingan rumah tangga - Petugas patrol sangat minim 	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi strategis untuk dikembangkan - Peningkatan peran serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan pihak akademis untuk embantu memberikan pengertian kepada masyarakat - Hampirsetiap tahun dilakukan penanaman mangrove - Perlu membentuk pengawas swakarsa masyarakat dalam mengawasi pelanggaran di lingkungan sekitarnya
4.	Meningkatnya Pendapatan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat ketidak akuratan data bidang kelautan dan perikanan dalam menentukan kebijakan pembangunan perikanan dan kelautan - Sangat susah merubah mainset nelayan cara hidup hemat dan gemar menabung - Masih minimnya minat masyarakat dalam usaha perikanan dan kelautan terutama usaha budidaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas statistic yang sangat terbatas - Masih rendahnya koordianasi antar pemangku kepentingan pada masyarakat di bidang kelautan dan perikanan - Kualitas lingkungan yang kurang bagus untuk usaha perikanan, khususnya perikanan budidaya dalam tambak 	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah dilakukan pendataan akan tetapi harus perlu ditingkatkan lagi - Peningkatan koordinasi dngan pemangku kepentingan - Melakukan kerja sama dengan instansi yang berkompeten dalam penelitian dan pengembangan potensi budidaya ikan
5.	Meningkatnya Jumlah Produksi Induk yang Bersertifikat	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga teknis Budidaya masih sangat terbatas - Perlu ada kajian pengembangan pembenihan di daerah yang mempunya sumber air lebih bagus daripada yang sekarang 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya anggaran dalam perekrutan tenaga teknis pembenihan - Lahan yang terbatas dalam pengembangan BBI baru 	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi yang cukup besar dalam pengemabangan - Harus ada kajian secara mendalam pada daerah yang dianggap layak dalam pengemabngan pembenihan
6.	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja di Bidang Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Masih belum meratanya bantuan perikanan dan kelautan kepada masyarakat - Masih minimnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendataan yang belum optimal - Masih banyak masyarakat yang menganggap usaha 	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi usaha perikanan dan kelautan yang cukup bagus - Masih ada minat masyarakat dalam usaha perikanan dan

		<ul style="list-style-type: none"> - pembinaan tentang usaha perikanan dan kelautan yang sangat menjajikan - Masih belum akuratnya pendataan daerah prioritas pengembangan perikanan, khususnya perikanan budidaya 	<ul style="list-style-type: none"> - perikanan adalah sebagai usaha sampingan - Lokasi yang luas dengan petugas pendata yang sangat terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> - kelatan - Kerja sama dengan BPS harus perlu ditingkatkan
7.	Meningkatnya Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan	<ul style="list-style-type: none"> - Masih minimnya anggaran untuk pembinaan dan pengembangan usaha budidaya ikan - Lingkungan yang terdegrasi oleh kepentingan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi tanpa memperhatikan lingkungan perairan - Masih terbatasnya pembinaan dan pelatihan usaha budidaya ikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Data yang belum akurat, sehingga usulan masih banyak di tolak - Aktifitas industry maupun rumahtangga yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan - Minimnya anggaran untuk pembinaan dan pelatihan usaha perikanan budidaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan SDM pendata - Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait - Meyusun anggaran prioritas untuk meningkatkan minat masyarakat dalam usaha budidaya ikan
8.	Meningkatnya Jumlah RTP Perikanan Tangkap	<ul style="list-style-type: none"> - Masih terbatasnya petugas pendata RTP Perikanan Tangkap - Bantuan perikanan yang belum merata - Belum memperhitungkan prioritas dalam pembangunan perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya petugas pendata RTP Perikanan - Terbitnya Pemendagri tentang teknis bantuanhibah dan Bansos, sehingga kegiatan terbentur pada aturan tersebut - Belum adanya pemetaan prioritas pembangunan perikanan tangkap 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan SDM pendata - Konsultasi dengan pihak terkait - Perlu adanya kajian dalam penentuan prioritas pembangunan perikanan tangkap
9.	Meningkatnya Jumlah Pengelola Hasil Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya anggaran dalam pengemabngan pengelolaan dan inovasi hasil perikanan - Sangat sulitnya memanejmn pengolah yang ada untuk membentuk usaha kelompok bersama - Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang pengolahan dan pemasaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Usulan sering kali ditolak karena usulan dana untuk pegembangan dan inovasi pengolahan hasil perikanan cukup besar - Terrbatasnya SDM yang kompeten dibidang ini - Masih rendahnya pembinaan dan pelatihan pengolahan hasil 	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi cukup bagus untuk dikembangkan menjadi produk yang mempunyai nilai tambah - Perlu adanya kerjasama dengan pihak terkait yang berkompeten dalam masalah ini - Masih adanya minat masyarakat dalam pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan
10.	Meningkatnya Jumlah Kelompok Pengawas Masyarakat Swakarsa/Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya pembinaan kepada masyarakat dalam pengawasan perikanan mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih bnayak masyarakat yang enggan untuk menjadi anggota POKMASWAS 	<ul style="list-style-type: none"> - Medan yang cukup luas yang tidak mungkin hanya diawasi oleh Dinas teknis yang SDMnya sangat terbatas
11.	Bertambahnya Kawasan Konservasi/Reservat Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Kajian terhadap kawasan konservasi/reservat masih sagat kurang 	<ul style="list-style-type: none"> - SDM yang berkompeten sangat terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi cukup banyak untuk pembentukan kawasan konservasi/reservat perikanan

- | | | | | | | | |
|-----|--|----------|--|---|---|---|---|
| 12. | Meningkatnya Armada Perikanan Tangkap >10 GT | Jumlah - | Minimnya anggaran dalam kegiatan ini, karena untuk revitalisasi armada perikanan membutuhkan dana yang tidak sedikit | - | Anggaran masih diprioritas untuk pembangunan infrastruktur berupa jalan, jembatan dan sarana-prasarana pendidikan dan kesehatan | - | Mengajukan permohonan bantuan dari APBD I maupun APBN |
|-----|--|----------|--|---|---|---|---|

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang kelautan dan perikanan. Sehingga secara khusus ada keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Strategi pengembangan dan pemanfaatan potensi perikanan secara optimal Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tercantum dalam Paragraf empat Kawasan Peruntukan Perikanan Pasal 38 yang berisikan :

- (2) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf d meliputi:
 - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan perikanan budi daya;
 - c. kawasan peruntukan pengolahan perikanan;
 - d. prasarana perikanan; dan
 - e. kawasan minapolitan.
- (3) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 65.500 (enam puluh lima ribu lima ratus) hektar, meliputi :
 - a. kawasan perikanan tangkap sungai dengan luas kurang lebih 25.500 (dua puluh lima ribu lima ratus) hektar dengan komoditas unggulan terdapat unggulan Ikan Baung, Ikan Sepat, Ikan Siam, Ikan Gabus, Ikan Lele, Ikan Betok, Ikan Tambakan, Ikan

- Belidas, Ikan Lais, dan Udang di Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Kuala Betara; dan
- b. kawasan perikanan tangkap laut dengan jalur penangkapan ikan diatas 2 mil laut hingga 12 mil laut dengan luas kurang lebih 40.000 (empat puluh ribu) hektar dengan komoditas Ikan Kembung, Ikan Layang, Ikan Bawal Putih, Ikan Bawal Hitam, Ikan Kakap, Udang Putih, dan Udang terdapat di Kecamatan Pangabuhan, Kecamatan Pangkal Duri dan Kecamatan Kuala Betara.
- (4) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 6.200 (enam ribu dua ratus ribu) hektar meliputi :
- d. Kawasan perikanan budidaya tambak dengan luas kurang lebih 5000 (lima ribu) hektar dengan komoditas unggulan Udang Windu, Udang Vaname dan Bandeng di Kecamatan Tungkal Ilir dan Kecamatan Kuala Betara;
- e. Kawasan Perikanan Budidaya kolam dengan luas kurang lebih 1000 (seribu) hektar dengan komoditas unggulan Ikan Nila, Ikan Patin, Ikan Bawal Air Tawar, Ikan Gurami dan Ikan Lele; dan
- f. Kawasan Perikanan Budidaya jaring apung/keramba dengan luas kurang lebih 200 (dua ratus) hektar dengan komoditas unggulan Ikan Patin, Ikan Nila Tomang dan Udang Galah terdapat di Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Merlung, Kecamatan Betara dan Kecamatan Pangabuan.
- (5) Kawasan peruntukan pengolahan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa dengan luas kurang lebih 100 (seratus) hektar terdapat di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Seberang Kota, dan Kecamatan Kuala Betara.
- (6) Prasarana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) di Kecamatan Bram Itam; dan

- b. pengembangan pelabuhan perikanan Kuala Tungkal Kecamatan Tungkal Ilir; dan
- c. rencana pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Sungai Dualap Kecamatan Betara.

(7) Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di Sungai Dualap Kecamatan Kuala Betara.

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Tabel 3.6 sebagai berikut :

Tabel. 3.6.
Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kawasan Peruntukan Perikanan Tangkap	- Daerah peruntukan untuk perikanan tangkap sudah tepat akan tetapi untuk perairan umum perlu kajian teknis untuk menentukan lokasi penangkapan ikan yang lestari dan berwawasan lingkungan	- Belum adanya kajian secara teknis dalam menentukan lokasi penangkapan ikan perairan umum	- Potensi yang cukup besar dalam pemanfaatan sumberdaya ikan di perairan umum
2.	Kawasan Peruntukan Perikanan Budidaya	- Dalam RTRW Kabupaten kawasan pengembangan perikanan budidaya tidak semua masuk, padahal setiap kecamatan dalam	- Lokasi yang luas, dan geografis di Kab. Tanjung Jabung Barat berbeda anatar ilir dan ulu, sehingga perlu	- Semua kecamatan dalam kabupaten mempunyai potensi yang berbeda-beda dan mempunyai peluang

		kabupaten mempunyai potensi perikanan yang berbeda-beda	kajian teknis yang mapan	untuk dikembangkan
		- Belum adanya kajian penentuan lokasi penegmabngan budidaya ikan dilihat dari perbedaan geografisnya		
3.	Kawasan Peruntukan Pengolahan Perikanan	- SDM yang masih terbatas	- Lokasi sudah tepat akan tetapi masih banyak yang harus dikembangkan, baik saparnya, bahan bakunya dan SDMnya	- Lokasi Strategis karena Kab. Tanjung Jabung Barat terletak di segetiga emas yang kedepan mempunyai potensi berkembang sangat pesat
4.	Prasarana Perikanan	- Terbatasnya anggaran dalam pengembangan prasarana perikanan	- Data yang belum akurat, sehingga dalam menentukan program dan kebijakan sering kali kurang tepat sasaran	- Lokasi Strategis karena Kab. Tanjung Jabung Barat terletak di segetiga emas yang kedepan mempunyai potensi berkembang sangat pesat
5.	Kawasan Minapolitan	- RTRW dengan dengan Keputusan Bupati tidak sinkron, dimana keputusan Bupati penentuan lokasi kawasan minapolitan terdapat di Kecamatan Tungkal Ilir, akan tetapi dalam RTRW kawasan minapolitan terdapat di Kec. Kuala Betara	- Kurangnya koordinasi pihak penyusun dengan dinas teknis terkait	- Potensi strategis di Kecamatan Tungkal ilir, karena infrastruktur di daeah Tungkal Ilir lebih lengkap dan tinggal pengembangan sedikit.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

3.5.1. Gambaran Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam menghadapi permintaan kebutuhan pasar akan komoditi sektor kelautan dan perikanan baik secara kualitas, kuantitas, kontinyuitas dan keragamannya baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Pembangunan kelautan dan perikanan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaannya menjadi lebih tepat sasaran. Posisi geostrategis Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam konstelasi regional dan

nasional belum terlalu dikenal sehingga ke depan pembangunan perikanan perlu ditingkatkan lagi dengan cara promosi daerah. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunannya sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan perikanan dan kelautan yang akan dihadapi Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2016 - 2021 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Masih terbatas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan profesionalisme teknis di bidang kelautan dan perikanan sumber daya manusia perencana pembangunan daerah.
- 2) Belum sempurnanya basis data dan informasi perikanan dan kelautan.
- 3) Terbatasnya permodalan.
- 4) Daya saing produk hasil perikanan.
- 5) Fluktuasi harga sarana produksi perikanan.
- 6) Terjadinya alih profesi.
- 7) Kondisi alam dan iklim yang tidak menentu

3.5.2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sasaran jangka menengah Renstra KKP sudah cukup sesuai dengan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga diharapkan dengan sasaran-sasaran tersebut dapat memberikan kontribusi pembangunan bidang kelautan dan perikanan.

3.5.3. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Selama kurun waktu lima tahun kedepan sasaran jangka menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi sudah cukup sesuai dengan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga diharapkan dengan sarsaran-saran tersbut dapat memberikan kontribusi pembangunan bidang kelautan dan perikanan untuk menciptakan Jambi TUNTAS pada tahun 2021.

3.5.4. Implikasi RTRW bagi Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Isu-isu strategis dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

- 1) Ketidakseimbangan pengembangan wilayah hulu dan hilir, karena potensi dasar yang dimiliki membutuhkan pengelolaan terpadu yang sinergi dan saling mendukung antar wilayah kecamatan.
- 2) Belum adanya pengaturan tentang pemanfaatan ruang wilayah perairan dan laut sesuai dengan peruntukan pengembangan usaha perikanan.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai berikut :

- 1) Implikasi terhadap arahan pemanfaatan ruang, Dinas Perikanan bertugas menjabarkan program-program yang tertuang dalam RTRW Kabupaten secara rinci meliputi : indikasi program utama, indikasi lokasi, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan indikasi waktu pelaksanaan.
- 2) Implikasi terhadap indikasi program utama pemanfaatan ruang, Dinas Perikanan bertugas menjabarkan RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka : a) perwujudan

- rencana tata ruang pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat; b) perwujudan kawasan strategis pembangunan perikanan dan kelautan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- 3) Implikasi terhadap indikasi sumber pendanaan, Dinas Perikanan bertugas merencanakan alokasi anggaran pemanfaatan ruang melalui sumber dana dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jambi dan/atau Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3.5.5. Implikasi KLHS bagi Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Isu-isu strategis terkait lingkungan hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

- 1) Terjadinya degradasi kualitas lingkungan dan sumber daya alam (hutan, pesisir, tanah, air dan udara) akibat pencemaran lingkungan;
- 2) Meningkatnya daerah rawan banjir, longsor, atau kekeringan sebagai dampak alih fungsi lahan dan berkurangnya daerah resapan air hujan;
- 3) Menurunnya ketersediaan sumber air baku untuk melayani kebutuhan air bersih penduduk;
- 4) Menurunnya keanekaragaman hayati dan flasma nuftah;
- 5) Berkurangnya ruang terbuka hijau akibat alih fungsi lahan yang berfungsi lindung menjadi kawasan terbangun.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan yang implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai berikut :

- 1) Menghitung kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan perikanan dan kelautan;
- 2) Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;

- 3) Kinerja layanan/jasa ekosistem;
- 4) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- 5) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

Dari uraian tersebut di atas maka dapat diperoleh informasi tentang apa saja isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun rencana, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 3.7 sebagai berikut :

Tabel 3.7
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal	Eksternal	
- Memiliki Wilayah Pesisir	Tercapai		Kewenangan dalam pengelolaan pesisir	Kualitas lingkungan semakin buruk	Kurang koordinasi dengan OPD yang menangani masalah lingkungan
- Pemberdayaan ekonomi Masyarakat Pesisir	Tercapai		Sumberdaya manusia masih terbatas	Minat masyarakat ada	Masih belum maksimalnya pelayanan SKP dalam pemberdayaan, karena masih terbatasnya sumberdaya manusia yang berkompeten
- Sumberdaya ikan ada	Tercapai		Punya kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya ikan	Sering tidak terkontrol oleh dinas dalam pemanfaatan sumberdaya ikan	Kurangnya sumberdaya manusia yang berkompeten dalam pengawasan

- Lahan untuk budidaya tersedia	Tercapai		Pemberian pelatihan kepada masyarakat dalam pengembangan budidaya ikan	Pendataan yang masih kurang akurat, sehingga sering terjadi tumpang tindih dalam pemberian pelatihan	Kurangnya sumberdaya manusia yang berkompeten dalam pengawasan
- Sarana dan prasarana penangkapan dan budiaya tersedia	Tercapai		Pemberian Izin usaha penangkapan	Nelayan sering tidak menghiraukan masalah perizinan penangkapan	Masih lemahnya sumberdaya manusia yang berkompeten dalam masalah ini
- Sumberdaya manusia tersedia	Tercapai		Pendataan yang akurat menentukan tepat tidaknya sasaran pemberian bantuan	Sering terjadi pendataan yang kurang akurat, sehingga memberikan dampak ketidakmerataan dalam pemberian bantuan kepada nelayan miskin	Masih kurangnya data yang akurat dalam menentukan jumlah nelayan penerima bantuan
- Menurunnya Jumlah Pelanggaran Penangkapan Ikan	Tercapai		Kewenangan dalam penindakan	SDM yang dimiliki blum bisa sepenuhnya dalam mengontrol pelanggaran penangkapan ikan	Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam masalah ini
- Pengelolaan Kawasan Konservasi perikanan	Tercapai		Identifikasi dan pengusulan penetapan kawasan	Belum akuratnya data-data pendukung dalam penentuan kawasan	Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam masalah ini
- Sarana dan Prasarana pendukung pembinaan, pemasaran dan pengolahan tersedia	Tercapai		Sumberdaya manusia tersedia	Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang masalah in	Dukungan dari daerah masih terbatas
- Peningkatan ekonomi masyarakat pengolah	Tercapai		Kewenangan dalam membantu peningkatan ekonomi	Belum tersedianya data yang akurat sehingga masih kurang tepat	Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait

			masyarakat pengolah	sasaran	dalam masalah ini
--	--	--	---------------------	---------	-------------------

Dari Tabel 3.7 diatas dapat dijelaskan bahwa dalam penentuan isu-isu strategis di atas tidak lepas dari pengaruh perubahan dinamika global, sehingga dalam dokumen Renstra ini mencoba untuk mengidentifikasi isu-isu strategis (*Lingkungan Eksternal*) yang akan mempengaruhi kinerja Dinas Perikanan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Tabel 3.8
Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika internasional	Dinamika nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1.	Terjadi perubahan perebutan batas wilayah perairan dengan Negara lain	Terjadi perebutan suatu daerah dengan daerah lain	Pencemaran lingkungan perairan pesisir yang tidak ditangani secara serius	
2.	Terjadi pencurian ikan oleh nelayan asing di perairan tangkapan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Selat Karimata, Laut Natuna dan ZEE Laut Cina Selatan)	Terjadi perubahan peraturan penangkapan ikan di yang sebelumnya telah ditetapkan	Kecemburuan sosial dengan daerah lain	
3.	Terjadi perubahan iklim secara global	Terjadi bencana alam, seperti banjir, badai dan fenomena upwelling	Menurunnya usaha penangkapan dan terganggunya usaha budidaya	
4.	Terjadi era globalisasi, dimana persaingan produk semakin ketat (Pasar Bebas)	Terjadi perubahan kebijakan nasional tentang pasar	Belum siapnya masyarakat, khususnya masyarakat yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan di daerah dalam menghadapi pasar bebas.	
5.	Terjadi ketidakstabilan ekonomi global	terjadi kenaikan barang/bahan baku di sector perikanan dan kelautan	Mahalnya sarana dan prasarana sector perikanan yang mempengaruhi ketidakstabilan ekonomi, khususnya di bidang kelautan dan perikanan	

Guna mewujudkan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung jabung Barat, maka Dinas Perikanan dalam mencapai suatu tujuan perlu memperhatikan analisis lingkungan strategis dan juga penguasaan informasi tentang masalah dalam Lingkungan Internal dan External. Selanjutnya dilakukan langkah-langkah strategi dengan menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Oportunity and Threats) dan kemudian dicari strategi alternatif dengan menciptakan kombinasi dari faktor-faktor yang terdapat dalam lingkungan strategis.

I. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan yang berasal dari dalam Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Faktor Kultural tersebut dijadikan sebagai Strength (kekuatan) dan Weakness (kelemahan).

A. Kekuatan (Strength)

- 1) Dinas Perikanan adalah Dinas Teknis sebagai Pengelola Perikanan dan Kelautan.
- 2) Adanya pelaku usaha di bidang prikanan dan kelautan (nelayan, pembudidaya ikan dan penampung/pengelola hasil perikanan).
- 3) Sarana/prasarana yang dimiliki.
- 4) SDM sesuai bidang tugas yang dimiliki.

B. Kelemahan (Weakness)

- 1) Rendahnya Penguasaan teknologi di bidang kelautan dan perikanan.
- 2) Terbatasnya dana pembangunan bidang kelautan dan perikanan.
- 3) Belum memadainya sarana dan prasarana
- 4) Belum memadainya SDM secara kualitas maupun kuantitas

II. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berperan dalam pembangunan Perikanan dan Kelautan yang berasal dari luar Dinas Perikanan. Faktor Eksternal tersebut dapat merupakan peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threats).

A. Peluang (Opportunity)

- 1) Minat masyarakat pada usaha bidang kelautan dan perikanan.
- 2) Potensi / sumberdaya usaha di bidang kelautan dan perikanan
- 3) Minat Investor pada Bidang kelautan dan perikanan
- 4) Dinamika keseimbangan Kelompok Tani Ikan dan Nelayan

B. Ancaman (Threats)

- 1) Era Globalisasi.
- 2) Stabilitas Keamanan dan Rawan Bencana Alam
- 3) Kurangnya modal usaha.
- 4) Pola usaha yang masih tradisional.

III. Penyusunan Formulasi Strategis

Penyusunan formulasi strategis dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh faktor internal yang merupakan Strength (kekuatan) dan Weaknesses (kelemahan) serta faktor eksternal yang merupakan *Opportunity* (peluang) dan *Threats* (ancaman) mempengaruhi keberhasilan pembangunan Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Analisa yang di lakukan yaitu pencermatan, pembobotan terhadap masing-masing point dari *Strength*, *Weaknses*, *Opportunity* dan *Threats* sehingga dapat dikatakan juga Analisa SWOT. Masing-masing point dari faktor internal diberikan bobot sehingga total bobot mencapai 100. Demikian juga pada faktor eksternal. Setelah pembobotan, masing-masing point faktor internal dan faktor eksternal diberikan Rating menurut nilai kepentingannya. Bobot yang ada dikalikan dengan rating akan mendapatkan skore. Berdasarkan skore yang diperoleh maka urutan prioritas yang paling mempengaruhi keberhasilan Pembangunan di Bidang kelautan dan perikanan dapat diketahui lebih jelas pada Table 3.9.

Guna mengetahui secara lebih jelas bagaimana perhitungan analisa Lingkungan Strategis dapat dilihat pada Tabel 3.9. sebagai berikut.

Tabel 3.9.
Analisis Strategi dengan Faktor SWOT

Lingkungan Strategis	Bobot	Rating	Skore	Prioritas
1	2	3	4	5
A. STRENGTH (KEKUATAN)				
1) Dinas Perikanan adalah Dinas Teknis sebagai Pengelola Perikanan dan Kelautan.				
2) Adanya pelaku usaha di bidang prikanan dan kelautan (nelayan, pembudidaya ikan dan penampung/pengelola hasil perikanan).	20	5	90	I
3) Sarana/prasarana yang dimiliki.				
4) SDM sesuai bidang tugas yang dimiliki.				
B. WEAKNESS (KELEMAHAN)				
1) Rendahnya Penguasaan teknologi di				

bidang kelautan dan perikanan.	11	2	60	II
2) Terbatasnya dana pembangunan bidang kelautan dan perikanan.	8	1	40	III
3) Belum memadainya sarana dan prasarana	11	2	60	IV
4) Belum memadainya SDM secara kualitas maupun kuantitas				
	14	3	75	I
	17	4	80	II
	8	1	40	III
	8	1	40	IV
	100			

Lingkungan Strategis	Bobot	Rating	Skore	Prioritas
1	2	3	4	5

C. OPRTUNITY (PELUANG)

1) Minat masyarakat pada usaha bidang kelautan dan perikanan.				
2) Potensi / sumberdaya usaha di bidang kelautan dan perikanan				
3) Minat Investor pada Bidang kelautan dan perikanan	16	4	80	I
4) Dinamika keseimbangan Kelompok Tani Ikan dan Nelayan				

D. THREATS (ANCAMAN)	20	5	90	II
1) Era Globalisasi.				
2) Stabilitas Keamanan dan Rawan Bencana Alam	8	1	40	III
3) Kurangnya modal usaha.				
4) Pola usaha yang masih tradisional.	10	2	50	IV
	18	4	85	I
	10	2	50	II
	10	2	50	III
	8	1	40	IV
	100			

IV. Strategi Alternatif

Setelah diketahui poin-poin dalam lingkungan strategis selanjutnya ditentukan strategi alternative, ada 4 (empat) strategi alternatif yaitu :

A. Strategi S – O

Yaitu kombinasi antara Strength (S) dan Opportunity (O). strategi ini adalah mengoptimalkan Srength (kekuatan) guna memanfaatkan Opportunity (peluang).

B. Strategi S – T

Yaitu kombinasi antara Strength (S) dan Threats (T). Dengan strategi ini kita berusaha mengoptimalkan kekuatan untuk menghadapi ancaman yang ada.

C. Strategi W – O

Yaitu kombinasi antara Weakness (kelemahan) dan Opportunity (O). Dengan strategi ini kita mencari solusi mengatasi kelemahan yang ada dalam memanfaatkan peluang.

D. Strategi W – T

Yaitu kombinasi antara Weakness (W) dan Threats (T). Pada strategi ini kita berusaha mengatasi kelemahan dalam rangka menghadapi ancaman yang ada.

Bagaimana strategi yang ditentukan dari keempat jenis strategi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

V. Strategi – strategi Opportunity

- A. Dinas Perikanan sebagai Dinas Teknis Pengelola. Pembangunan Bidang kelautan dan perikanan dapat berperan mengembangkan potensi daerah guna menunjang tujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial masyarakat khususnya petani ikan dan Nelayan
- B. Dengan perencanaan kerja yang matang dan pedoman kerja yang baik dan tertata diikuti motivasi kerja karyawan dengan SDM yang sesuai bidang tugasnya serta mengoptimalkan penggunaan sarana/prasarana yang dimiliki dapat memberikan pelayanan yang prima pada masyarakat yang memiliki minat yang tinggi untuk mengembangkan usaha di Bidang kelautan dan perikanan. Adapun bentuk pelayanan dapat berupa pembinaan kelembagaan kelompok guna meningkatkan dinamika kelompoknya, mengusahakan permodalan kelompok untuk mengembangkan usaha dengan menarik investor.

VI. Strategi Strength – Threats (ST)

- A. Motivasi kerja karyawan yang tinggi merupakan modal bagi Dinas Perikanan untuk menjadi Pengelola yang profesional sehingga mampu menciptakan usaha di Bidang kelautan dan perikanan yang dapat bersaing di Era Globalisasi dan Perdagangan bebas.
- B. Perencanaan yang matang dan pedoman kerja yang tertata didukung dengan optimalisasi sarana dan prasarana yang ada diharapkan mampu mengatasi situasi dan kondisi apapun termasuk pengaruh stabilitas keamanan dan kondisi alam.
- C. Pemberdayaan karyawan dengan SDM yang sesuai bidang tugas yang dimiliki melalui pembinaan teknis secara terus menerus diharapkan dapat membantu mengatasi kurangnya permodalan dengan cara kredit perbankan atau kemitraan dengan investor sehingga akan berdampak pada perubahan pola usaha tradisional kearah usaha berwawasan agribisnis.

VII. Strategi Weakness – Oportunity (WO)

- A. Alokasikan dana yang tersedia sesuai urutan prioritasnya serta manfaatkan minat investor pada usaha Bidang kelautan dan perikanan agar mampu mengimbangi minat masyarakat yang tinggi pada usaha Bidang kelautan dan perikanan.
- B. Pembentukan *Team Work* untuk mengatasi belum memadainya SDM secara kualitas dan kuantitas serta memanfaatkan dinamika lembaga kelompok agar lebih aktif berkoordinasi dengan Dinas sehingga sarana kendala operasional yang belum memadai dapat teratasi.

VIII. Strategi Weakness – Threats (WT)

- A. Manfaatkan seefisien mungkin dana pembangunan yang ada dalam rangka pemenuhan modal usaha petani ikan dan nelayan sehingga mampu mengubah pola usaha tradisional kearah usaha agribisnis.
- B. Tingkatkan kualitas/kuantitas SDM yang dimiliki dalam menghadapi era globalisasi.
- C. Optimalkan penggunaan sarana operasional yang belum memadai agar mampu mengatasi timbulnya bencana alam

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Berdasarkan pernyataan visi dan misi ketiga Kepala dan Wakil Kepala Daerah ditetapkanlah tujuan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan dan kelautan;
2. Meningkatkan kualitas masyarakat perikanan untuk pengembangan usaha perikanan yang Tangguh;
3. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui

penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Berdasarkan pernyataan tujuan dinas ditetapkanlah sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan.
2. Meningkatnya pembinaan dan pendampingan masyarakat perikanan dalam mengembangkan usaha perikanan yang Tangguh.
3. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021, dapat dilihat pada Tabel 4.1. di bawah ini, yaitu :

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun Ke -					
					1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan dan kelautan	Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan	1) Jumlah Produksi Perikanan	Ton	23.798	25.112	27.766	30.725	33.973	37.540
			- Perikanan Tangkap (Laut dan Umum)	Ton	21.734	22.790	23.929	26.125	26.884	28.901
			- Perikanan Budidaya	Ton	1.934	2.102	1.985	2.084	2.150	2.250
2.	Meningkatkan kualitas masyarakat perikanan untuk pengembangan usaha perikanan yang Tangguh	Meningkatnya pembinaan dan pendampingan masyarakat perikanan dalam mengembangkan usaha perikanan Tangguh	2) Jumlah Produksi Benih Ikan	Ribu Ekor	476.000	550.000	630.000	680.000	710.000	750.000
			3) Jumlah Kelompok Masyarakat yang Menerapkan Teknologi Perikanan	Kelompok	10	10	10	10	10	10
			4) Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP)	RTP	4.430	4.500	4.600	4.725	4.800	4.990
3.	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya	5) Jumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	Kelompok	0	2	2	2	2	2
			6) Jumlah Jumlah Konsumsi Ikan Masyarakat	Kg/Kpt/Thn	32,07	32,80	33,00	33,45	33,93	34,00

daya perikanan dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan dan perikanan dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan	7) Jumlah Benih Ikan untuk Restocking	Ekor	50.000	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	8) Jumlah POKMASWAS	Kelompok	0	1	2	2	2	2
	9) Jumlah Kawasan Reservat/Lubuk Larangan	Kawasan	0	1	1	1	1	1

BAB V.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Berikut strategi dan kebijakan yang dirumuskan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu :

5.1. Strategi

1. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengembangan usaha perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan hasil perikanan;
2. Meningkatkan pemberdayaan dan kualitas sumber daya manusia perikanan menuju kemandirian yang tangguh;
3. Mendayagunakan sumberdaya manusia dalam pengawasan dan pengendalian secara periodik terhadap pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan.

5.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan arah tindakan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah, dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kebijakan Dinas Perikanan selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten bahkan dengan kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan (umum) Kepala Dinas yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan agribisnis dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan guna mendukung peningkatan produksi perikanan dan kelautan;
2. Peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat perikanan menuju hasil perikanan dan kelautan yang tangguh;
3. Peningkatan Pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang optimal dan berkelanjutan.

Untuk dapat melihat relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan, dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini :

Tabel. 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI :

Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat Dan Berkualitas

Misi 3.

Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Melalui Agroindustri dan Perikanan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan dan kelautan	Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan	Meningkatkan sarana untuk pengembangan usaha perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan hasil perikanan	Pengembangan agribisnis dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan guna mendukung peningkatan produksi perikanan dan kelautan
Meningkatkan kualitas masyarakat perikanan untuk pengembangan usaha perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan	Meningkatnya pembinaan dan pendampingan masyarakat perikanan dalam mengembangkan usaha perikanan yang Tangguh	Meningkatkan pemberdayaan dan kualitas sumber daya manusia perikanan menuju kemandirian yang tangguh	Peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat perikanan menuju hasil perikanan dan kelautan yang tangguh
Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya	Meningkatnya pengelolaan dan	Mendayagunakan sumberdaya manusia	Peningkatan Pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang optimal dan

perikanan dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan dalam pengawasan dan pengendalian secara periodik terhadap pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan berkelanjutan

BAB VI.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program dan Kegiatan

Arah kebijakan dan strategi Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 – 2021 yang telah diuraikan tersebut akan diimplementasikan kedalam program dan kegiatan dimana program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasi oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu-isu strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Dengan demikian, maka program untuk tahun 2016 – 2021 menyesuaikan dengan Perangkat Daerah yang baru maka penyusunan program pembangunan perikanan dan kelautan Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan terus berlanjut dan diprioritaskan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Program menjadi instrumen untuk menentukan sasaran yang diproyeksikan dengan memanfaatkan sumberdaya dan sumber dana tertentu. Program serta kegiatan-kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan produksi perikanan dari hasil budidaya ikan.

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- 1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan;

- 2) Pengembangan Budidaya Air Tawar dan Air Payau;
- 3) Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan Budidaya;
- 4) Pembangunan UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Pembengis UPBAP Tj. Labu;
- 5) Pengawasan Hama Penyakit Ikan dan Lingkungan;
- 6) Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan POKDAKAN; dan
- 7) Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar dan Air Payau.

2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat nelayan dan pengembangan usaha perikanan tangkap di laut dan Perairan Umum.

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- 1) Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan;
- 2) Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap; dan

3. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Program Ini diarahkan untuk pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta promosi dan publikasi bidang kelautan dan perikanan

- 1) Pembinaan Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- 2) Promosi dan Publikasi Kegiatan Sektor Perikanan dan Kelautan;

4. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Program ini diarahkan untuk Pelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- 1) Pembinaan Kelembagaan dan Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan;
- 2) Pembinaan dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan dan SDI.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada Tabel 6.2. sebagai berikut :

6.2. Target Kinerja

1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1.
Indikator Kinerja Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS DAN DAN INDIKATOR KINERJA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
SS 1 : MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN DAN KELAUTAN						
1. Jumlah Produksi Perikanan	23.798	25.112	27.766	30.725	33.973	37.540
- Perikanan Tangkap (Ton)	21.734	22.790	23.929	25.125	26.884	28.901
- Perikanan Budidaya (Ton)	1.934	2.102	1.985	2.084	2.150	2.250

2.	Jumlah Produksi Benih Ikan (Ekor)	476.000	550.000	630.000	680.000	710.000	750.000
----	-----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

SS. 2 : MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN MASYARAKAT PERIKANAN DALAM MENGEMBANGKAN USAHA PERIKANAN YANG TANGGUH

3.	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Menerapkan Teknologi Perikanan (Kelompok)	10	10	10	10	10	10
4.	Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP)	4.430	4.500	4.600	4.725	4.880	4.990
5.	Jumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR) (Kelompok)	0	2	2	2	2	2

SS 3 : MENINGKATNYA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN SECARA OPTIMAL DAN BERKELANJUTAN

6.	Jumlah Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kpt/Thn)	32,07	32,80	33,00	33,45	33,93	34,00
7.	Jumlah Benih yang di Tebar (Restocking) (Ekor)	50.000	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8.	Jumlah POKMASWAS	0	1	2	2	2	2
9.	Jumlah Kawasan Reservat/Lubuk Larangan (Kawasan)	0	1	1	1	1	1

2. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, Dinas Perikanan kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi OPD dapat dilihat pada Tabel 6.2.

3. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi OPD dapat dilihat pada Tabel 6.2.

6.3. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan Perikanan dan Kelautan, serta mencapai target sasaran utama sebagaimana disebutkan dalam bab terdahulu, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD, Dana Alokasi Khusus/DAK), swasta, perbankan dan non perbankan, dan masyarakat. Pendanaan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yakni fokus pada kepentingan untuk kesejahteraan masyarakat Perikanan dan Kelautan. Sementara itu dilakukan penguatan sinergi pendanaan antara KKP, K/L terkait serta APBD. Pendanaan juga diharapkan dapat dilakukan melalui operasionalisasi Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) serta kredit yang disalurkan melalui perbankan. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 6.2.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Didalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selanjutnya perlu ditetapkan Indikator Kinerja Dinas Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD tersebut. Indikator Kinerja Dinas Perikanan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 7.1 dibawah ini.

**Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan yang Mengacu pada
Tujuan dan sasaran RPJMD**

1	Indikator Kinerja	3 Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Pada Tahun Ke -						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	22,636	23,798	25,112	27,766	30,725	33,973	41,714	205,724
	- Perikanan Tangkap (Laut dan Umum)	Ton	20,719	21,734	22,790	23,929	25.125	26.884	28.901	170.082
	- Perikanan Budidaya	Ton	1,828	1,934	2,102	1.985	2.084	2.150	2.250	14.333

2	Jumlah Produksi Benih Ikan	Ekor	476,000	476,000	550,000	630,000	680,000	710,000	750,000	4,272,000
3	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Menerapkan Teknologi Perikanan	Kelompok	50	10	10	10	10	10	10	110
4	Jumlah Rumah Tangga Perikanan	RTP	4,430	4,430	4,500	4,600	4,725	4,880	4,990	32,555
5	Jumlah Unit Pembenihan rakyat (UPR)	Kelompok	4	0	1	2	2	2	2	13
6	Jumlah Konsumsi Ikan	Kg/Kpt/Thn	32,07	32,07	32,80	33,00	33,45	33,93	34,00	34,00
7	Jumlah Benih Ikan untuk Restocking	Ekor	80,000	50,000	60,000	80,000	80,000	80,000	80,000	510,000
8	Jumlah POKMAWAS	Kelompok	3	0	1	2	2	2	2	12
8	Jumlah Kawasan Reservat/Lubuk Larangan	Kawasan	5	0	1	1	1	1	1	10

Keterangan : Kalimat bercetak tebal merupakan Indikator dalam RPJMD

BAB VIII. PENUTUP

Rencana strategis Dinas yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan merupakan acuan bagi pelaksanaan program pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan. Untuk itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pelaku di sektor kelautan dan perikanan. Dengan dijalankannya Renstra ini secara konsisten, diharapkan akan tercipta kesatuan gerak dari *stakeholders* pembangunan kelautan dan perikanan. Komunikasi yang intensif yang didasari semangat kekeluargaan dan profesionalisme harus terus dikembangkan agar hasil pembangunan kelautan dan perikanan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Melalui musrenbangdes, Musrenbangcam, Forum OPD, *Stakeholders* menyampaikan masukan tentang prioritas pembangunan yang dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Dinas Perikanan. Rancangan RENJA tersebut kemudian dibahas dalam Musrenbang Kabupaten. Rancangan Renja tersebut kemudian dibahas dalam musrenbangkab untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam menyusun Kerja Dinas Perikanan Pimpinan

Satuan Kerja harus mempedomi Renstra Dinas dan hasil Musrenbangkab/RKPD final. Renstra Dinas Perikanan menjadi dasar evaluasi dan penyusunan Laporan Pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sebagai Dokumen Pernyataan Jangka Mengengah, Renstra ini harus dijadikan Pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas serta rencana-rencana Kerja Bidang di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena Rencana Strategis saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengarahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Rencana Strategis yang telah disusun ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh Pejabat dan Staf serta masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat kita perlukan, agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbinganNya kepada kita sekalian. Amin Ya Robbal Alamain.

SEMOGA BERMANFAAT.....!!!!

“Perencanaan yang baik bukan berarti segala-galanya, Tetapi Tanpa perencanaan yang baik, segala-galanya menjadi tidak berarti”



Tabel 6.2.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PERIKANAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016 - 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Periode Awal Renstra	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
								2016		2017		2018		2019	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			2	05	DINAS PERIKANAN				2.201.407.654		4.992.109.350		4.268.623.000		4.477.31
Meningkatkan Produksi dan Produktifitas Perikanan dan Kelautan	Meningkatnya Produksi Perikanan dan Kelautan				Jumlah Produksi Perikanan	Ton	22.547	23.668		24.892		25.914		27.209	
					- Perikanan Tangkap (laut dan Perairan Umum)	Ton	20.719	21.734		22.790		23.929		25.125	
					- Perikanan Budidaya	Ton	1.828	1.934		2.102		1.985		2.084	
					Jumlah Produksi Benih Ikan	Ribu Ekor	476.000	476.000		550.000		630.000		680.000	
Meningkatkan Kualitas Masyarakat Perikanan untuk Pengembangan Usaha Perikanan Yang	Meningkatnya Pembinaan dan Pendampingan Masyarakat Perikanan dalam Mengembangkan Usaha Perikanan				Jumlah Kelompok Masyarakat yang Menerapkan Teknologi Perikanan	Kelompok	50	10		10		10		10	
					Jumlah RTP	RTP	4.430	4.430		4.500		4.600		4.725	

tanggung	yang Tangguh	Peningkatan Pendapatan Pembudidaya Ikan sekaligus Peningkatan Produksi Benih Ikan			Jumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	Kelompok	4	0		2		2		2	
Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan secara Optimal dan Berkelanjutan	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan secara Optimal dan Berkelanjutan	Peningkatan Jumlah Konsumsi Ikan			Jumlah Konsumsi Ikan	Kg/Kpt/Thn	32,07	32,07		32,80		33,00		33,45	
		Peningkatan Kelestarian Sumberdaya Perikanan			Jumlah Benih yang di Tebar (Restocking)	Ribu Ekor	80.000	50.000		60.000		80.000		80.000	
		Peningkatan Jumlah Kawasan Reservat/Lubuk Larangan			Jumlah Kawasan Reservat/Lubuk Larangan	Lokasi	5	0		1		1		1	
			01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Meningkatnya Tata Kelola Perkantoran yang baik, transparan dan akuntabel	%	80	80	494.857.654	80	518.966.850	80	1.115.700.000	80	1.172.500.000
			01	Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah bulan dalam penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	12	4.350.000	12	4.350.000	12	4.500.000	12	4.500.000
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah bulan dalam penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Bulan	12	12	92.400.000	12	97.500.000	12	97.500.000	12	97.500.000
			07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Aparatur Teknis yang mendapatkan Honorarium	Bulan	12	12	90.540.000	12	110.960.000	12	115.000.000	12	115.000.000
			08	Penyediaan Jasa Kebersihan	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	Bulan	12	12	7.441.254	12	7.576.560	12	8.000.000	12	8.500.000
			10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Macam Penyediaan Alat Tulis Kantor	Macam	40	40	62.224.800	40	53.131.850	40	55.000.000	40	58.000.000
			11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan	Bulan	12	12	15.880.000	12	18.040.000	12	18.500.000	12	18.500.000

			12	Penyediaan komponen instalasi / penerangan bangunan kantor	Jumlah macam penyediaan kompen listrik	Bulan	12	12	1.821.600	12	1.867.800	12	2.000.000	12	2.000.000
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan media cetak	Bulan	12	12	6.000.000	12	11.000.000	12	11.000.000	12	12.500.000
			17	Penyediaan makan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum rapat	Bulan	12	12	4.200.000	12	4.200.000	12	4.200.000	12	6.000.000
			18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah bulan penyediaan SPPD dalam/luar daerah	Bulan	12	12	210.000.000	12	210.340.640	12	800.000.000	12	850.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Periode Awal Renstra	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
								2016		2017		2018		2019	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	80	100	422.045.000	100	830.190.000	100	477.000.000	100	379.000.000
			09	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor	Unit	47	2	110.000.000	4	27.600.000	3	35.000.000	5	30.000.000
			13	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Unit	19	3	52.400.000	4	24.500.000	4	30.000.000	5	25.000.000
			20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase pemeliharaan gedung kantor	%	100	100	16.000.000	100	449.250.000	100	150.000.000	100	55.000.000

	22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan	Unit	32	37	227.845.000	30	241.390.000	32	240.000.000	32	245.000.000
	26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan	Unit	32	32	15.800.000	37	15.050.000	40	22.000.000	45	24.000.000
	27	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Persentase Rehabilitasi Bangunan Gedung	%	100	0	0	100	72.400.000	100	25.000.000	100	45.000.000
03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan	Stell	71	108	39.700.000	64	26.800.000	64	27.000.000	64	27.000.000
	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan	Stell	71	108	39.700.000	64	26.800.000	64	27.000.000	64	27.000.000
05		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan formal/non formal	OK	8	8	25.000.000	8	55.000.000	8	55.000.000	10	55.000.000
	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal/Non Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan formal/non formal	OK	8	5	25.000.000	8	55.000.000	8	55.000.000	10	55.000.000
06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Statistik Tahunan	%	100	100	318.375.000	100	195.525.000	100	200.000.000	100	205.000.000
	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Dokumen Perencanaan	Dokumen	3	5	170.875.000	5	77.250.000	5	80.000.000	5	80.000.000
	17	Pengumpulan dan pengolahan data-data statistik perikanan	Tersedianya data-data statistik perikanan yang terbaru	Buku	10	10	147.500.000	10	118.275.000	10	120.000.000	10	125.000.000

			#	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.828	1.934	926.430.000	2.102	1.829.220.000	1.985	1.308.687.000	2.085	1.439.55
			12	Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan	Jumlah POKDAKAN dan UPR yang mendapatkan Bantuan Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan	Kelompok	10	0	0	10	334.750.000	10	350.750.000	10	385.82
			13	Pengembangan Budidaya Air Tawar dan Air Payau	Tersedianya Bantuan Benih dan Pakan Ikan	Ekor/Kg	900.000/9.700	450.000/200	365.000.000	360.000/7.000	275.000.000	360.000/7.000	284.937.000	360.000/7.000	313.43

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Periode Awal Renstra	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
								2016		2017		2018		2019	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			14	Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan Budidaya	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis pembudidaya ikan yang baik an berstandard	Orang	140	0	0	208	229.250.000	300	105.000.000	300	115.50
			15	Pembangunan UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Pembengis UPBAP Tj. Labu	Jumlah produksi benih ikan	Ekor	445.000	476000	301.430.000	550.000	507.320.000	630.000	230.000.000	680.000	253.00

	16	Pengawasan Hama Penyakit Ikan dan Lingkungan	Terlaksananya Monitoring Hama dan Penyakit Ikan	Bulan	0	0	0	12	71.050.000	12	75.000.000	12	82.500.000
	17	Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan POKDAKAN	Jumlah Kelompok yang mendapatkan pemberdayaan dan legalitas Pembudidaya ikan	Kelompok	10	0	0	10	190.000.000	10	98.000.000	10	107.800.000
	18	Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar dan dan Air Payau	Terlaksananya pengembangan kawasan budidaya ikan	Lokasi	3	3	260.000.000	3	221.850.000	2	165.000.000	3	181.500.000
	21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	20.718	21.734	0	22.790	916.200.000	25.069	760.500.000	27.576	836.500.000
	13	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Unit/Piece	308	0	0	46/700	509.950.000	46/700	485.500.000	46/700	534.000.000
	14	Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan	Jumlah Masyarakat Nelayan yang mendapatkan Pembinaan dan Perlindungan Nelayan	Kelompok	29	10	0	5	406.250.000	5	275.000.000	5	302.500.000
	#	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah Konsumsi Ikan	Kg/Kpt/Thn	32,07	32,07	0,00	32,80	#####	33,00	178.536.000,00	33,45	196.389.000,00
	12	Pembinaan Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan	Kelompok	58	0	0	10	97.900.000	10	72.036.000	10	79.200.000

				13	Promosi dan Publikasi Kegiatan Sektor Perikanan dan Kelautan	Persentase terlaksananya promosi dan publikasi kegiatan perikanan (Sosialisasi Gemar Makan Ikan, Pameran HUT Tanjung Jabung Barat, Jambi, Expo, Pameran Hari Krida Pertanian, pameran diluar provinsi, publikasi media dan pameran lainnya	%	100	0	0	75	157.500.000	100	106.500.000	100	117.15
--	--	--	--	----	--	--	---	-----	---	---	----	-------------	-----	-------------	-----	--------

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Periode Awal Renstra	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
								2016		2017		2018		2019	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			#	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Menerapkan Teknologi Perikanan (Kelompok)	Kelompok	50	10	0	10	419.807.500	10	201.200.000	10	221.32

			11	Pembinaan Kelembagaan dan Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan	Kelompok	5	5	0	5	97.900.000	5	93.500.000	5	102.85
			12	Pembinaan dan Pelestarian Sumberdaya Ikan	Jumlah Benih yang di Tebar (Restocking)	Ribu Ekor	80.000	50.000	0	60.000	321.907.500	80.000	107.700.000	80.000	118.4